

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2015-2017)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ivana Ardelia Rhomandhonna

No. Mahasiswa : 16312279

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2015-2017)**



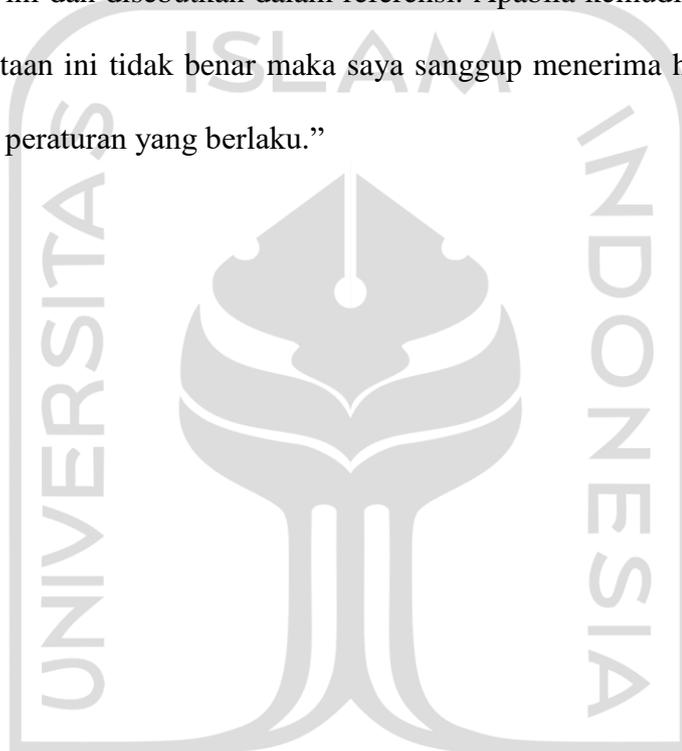
No. Mahasiswa: 16312279

الجمعة الاستاذة الاندو

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 25 April 2022

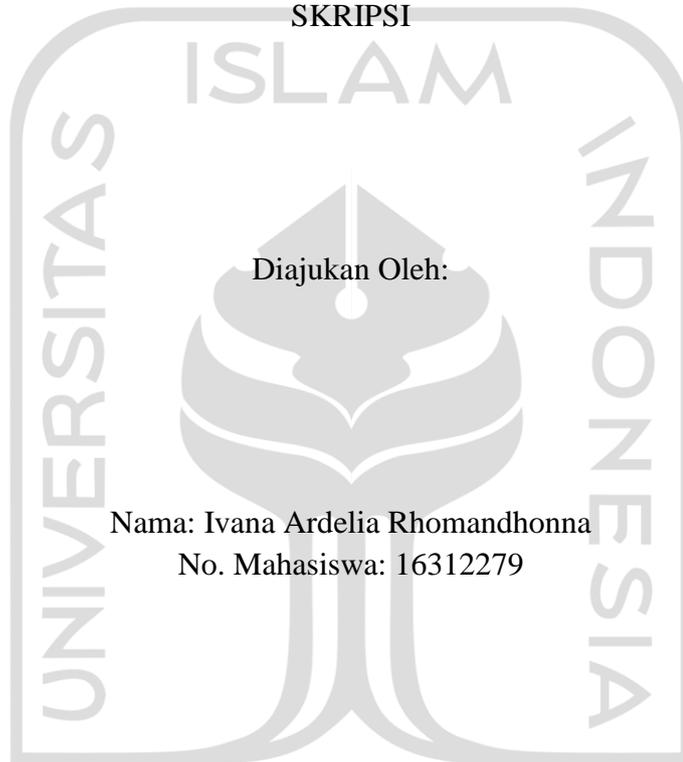
Penulis,



(Ivana Ardella Rhomandhonna)

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2015 -2017)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama: Ivana Ardelia Rhomandhonna

No. Mahasiswa: 16312279

الجامعة الإسلامية
Indonesia
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 11 April 2022

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kinanthi Putri Ardiami', is written over the text of the supervisor's name.

(Kinanthi Putri Ardiami, S. E., M. Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017)**

Disusun Oleh : **IVANA ARDELIA RHOMANDHONNA**

Nomor Mahasiswa : **16312279**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 29 April 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Kinanthi Putri Ardiami,,S.E., M.Ak.



Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH.,M.Sc.,SAS.,ASPM.,Ph.D.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan kebenaran. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017)”** ini dengan sebaik-baiknya tidak lepas dari do'a, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-I (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini dapat diselesaikan selain karena usaha penulis, juga berkat do'a, dukungan, bantuan, dan bimbingan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rezeki-Nya. Selalu ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari setiap hal yang telah Engkau berikan

2. Kedua orangtua, Bapak Warsito dan Ibu Dwi Astuti yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil yang tidak dapat penulis gantikan kecuali Allah yang akan menggantinya, mulai dari awal berkuliah hingga akhir ini. Penulis memohon maaf, karena tidak dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan yang kalian harapkan
3. Mamak, Ibu Sri Suparti yang selalu mendo'akan cucunya dan memberikan dukungan materiil selama penulis berkuliah
4. Adik satu-satunya, Nathania Asti Tsany Prabaswara yang selalu mengerti dan memahami
5. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan nasehat serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis
6. Ibu Kinanthi Putri Ardiami, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing pengganti yang juga telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, saran, nasehat serta waktunya untuk membimbing penulis
7. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
8. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
9. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, pegawai, dan staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
11. Teman penulis, Mas Muhammad Kurniawan, yang telah memberikan dukungan selama kuliah, telah bersedia mendengarkan segala cerita penulis
12. Teman penulis, Kakak Rudi Ikhsan Wisesa, yang juga telah memberikan dukungan selama kuliah, telah memberikan banyak nasihat, motivasi dan solusi, serta bersedia mendengarkan segala cerita penulis
13. Teman penulis, Mas Mahmud Beny Sulistya, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Teman-teman penulis Lia, Jati, Mas Erwin, Kholiq, Yusrizal, serta teman-teman JJB (Angel, Della, Erva, Tika, Cupi) yang telah memberikan semangat kepada penulis
15. Teman-teman HMJA UII periode 2017/2018 dan teman-teman akuntansi angkatan 2016, yang telah membantuku selama menjalani kuliah
16. Pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Semoga skripsi ini dapat berguna untuk dapat dijadikan sebagai referensi bagi berbagai pihak yang akan melakukan penelitian serupa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Penulis

Ivana Ardelia Rhomandhonna

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel.....	14
2.1.1 Teori Penatalayanan (<i>Stewardship Theory</i>).....	14
2.1.2 Karakteristik Pemerintah Daerah.....	15
2.1.3 Opini Audit	25
2.1.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26
2.2 Telaah Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Hipotesis Penelitian	38
2.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	38
2.3.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	39

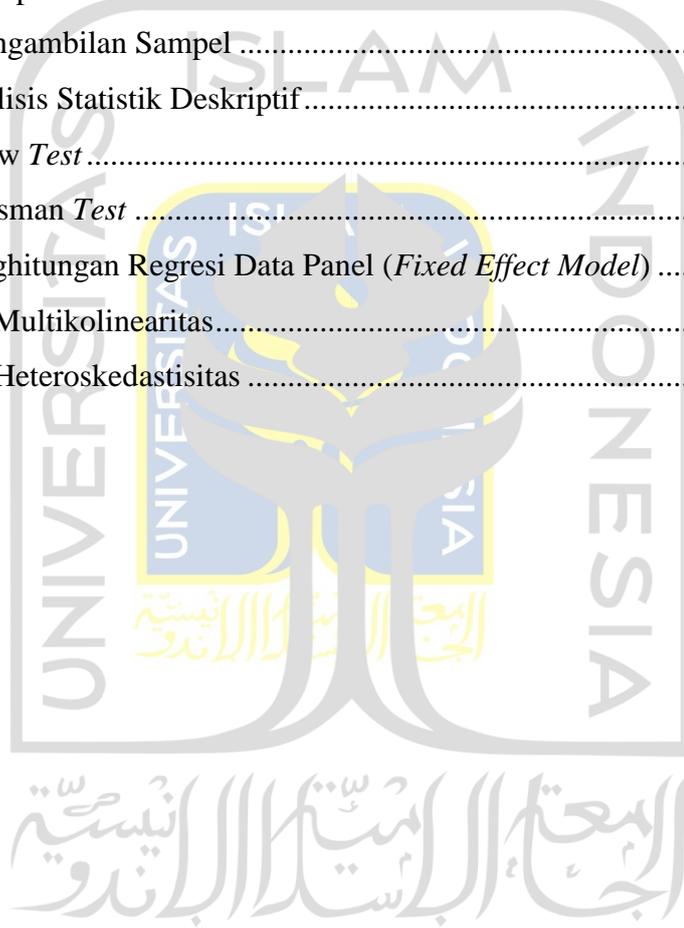
2.3.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	41
2.3.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	42
2.3.5 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	43
2.3.6 Pengaruh Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	44
2.3.7 Pengaruh Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur	45
2.3.8 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Populasi dan Sampel.....	48
3.2 Metode Pengumpulan Data	50
3.3 Variabel Penelitian	50
3.3.1 Variabel Dependen	50
3.3.2 Variabel Independen.....	51
3.4 Metode Analisis Data	53
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	53
3.4.2 Analisis Regresi Data Panel.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Pemilihan Sampel.....	65
4.2 Statistik Deskriptif.....	66
4.3 Analisis Regresi Data Panel	70
4.3.1 Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel	70
4.3.2 Model Regresi Data Panel	72
4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	75

4.3.4 Uji Kelayakan (<i>Goodness of Fit</i>) Model Regresi Data Panel....	77
4.4 Pembahasan	81
4.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah.....	81
4.4.2 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah	82
4.4.3 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah.....	83
4.4.4 Belanja Modal Pemerintah Daerah	85
4.4.5 Jumlah Penduduk Pemerintah Daerah	85
4.4.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	87
4.4.7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah	87
4.4.8 Opini Audit Pemerintah Daerah	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	91
5.3 Implikasi.....	92
5.4 Keterbatasan	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Tiga Provinsi Dengan Skor EKPPD Tertinggi	4
1.2 Daftar 10 Kabupaten Dengan Skor EKPPD Tertinggi.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu	31
3.1 <i>Range</i> Kategori Prestasi	49
3.2 Indikator Opini Audit.....	51
4.1 Proses Pengambilan Sampel	63
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	64
4.3 Hasil Chow <i>Test</i>	69
4.4 Hasil Hausman <i>Test</i>	70
4.5 Hasil Penghitungan Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect Model</i>)	71
4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Pemilihan Sampel Penelitian

Lampiran 3 : Data Ranking, Skor EKPPD, dan Opini Audit Pemerintah Daerah

Lampiran 4 : Data Non-Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran 5 : Data Total Aset dan Ukuran Pemerintah Daerah

Lampiran 6 : Data Total Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Lampiran 7 : Data Total Pendapatan Pemerintah Daerah

Lampiran 8 : Data Dana Perimbangan dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Lampiran 9 : Data Total Belanja Modal Pemerintah Daerah

Lampiran 10 : Hasil Uji dan Hasil Regresi



ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the effect of local government characteristics and audit opinions on the performance of local government. The characteristics of local government in this research are size, level of wealth, level of dependence, capital expenditure, population, number of ASN employees, and number of OPD. Population in this research is the district government in East Java Province in 2015-2017. Sampling method used purposive sampling and the analysis model used was panel data analysis with Eviews 9. The results of this research indicate that the size of the local government, the level of dependence, capital expenditure, the number of ASN employees, and the number of OPD have a significant positive effect on the performance of local government. The level of wealth and audit opinion have a significant negative effect on the performance of local government, while the population has no effect on the performance of local government.

Keywords: characteristic, EKPPD, administration performance, local government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, jumlah penduduk, jumlah pegawai ASN, dan jumlah OPD. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan model analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan aplikasi *Eviews 9*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, belanja modal, jumlah pegawai ASN, dan jumlah OPD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kekayaan dan opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci: karakteristik, EKPPD, kinerja penyelenggaraan, pemerintah daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi ialah sebuah kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu (Weber, 2009). Organisasi berdasarkan sektor atau lingkungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi sektor swasta (*private*) dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor swasta (*private*) adalah organisasi-organisasi yang dimiliki secara perseorangan atau sekelompok orang dan berorientasi pada profit. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sebenarnya beberapa pelayanan publik dapat dilakukan oleh organisasi sektor swasta, namun fungsi sektor publik dalam hal birokrasi pemerintahan tidak dapat tergantikan oleh organisasi sektor swasta. Contoh organisasi sektor publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah yang berprinsip pada asas otonomi. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

otonomi daerah.” Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasar asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasar Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah bahwa,

“Otonomi daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran berikut: peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah; kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan; untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah; menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.”

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah akan lebih leluasa untuk mengelola dan membuat peraturan yang tentunya bertujuan untuk lebih memajukan daerahnya. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik (T. R. Nugroho & Prasetyo, 2018). Otonomi daerah akan memberikan dampak yaitu masyarakat lebih mudah untuk menyalurkan aspirasinya dan aspirasi tersebut akan dipertimbangkan menjadi sebuah kebijakan oleh pembuat kebijakan yang akan berpihak pada kepentingan masyarakat (Artha, Basuki, & MT, 2015). Meskipun tiap daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengadakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis untuk mengukur kinerja atau kemajuan pemerintah daerah.

Untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, diperlukan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis. Pemerintah

pusat mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dengan melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Permendagri No. 73 Tahun 2009 menyatakan,

“Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.”

Tujuan dari adanya EKPPD yaitu untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan atau pengelolaan pemerintahan daerah (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Bentuk pelaksanaan EKPPD tahunan meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara nasional. Berdasar Permendagri No. 73 Tahun 2009, metode yang digunakan dalam EKPPD adalah menggunakan nilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EKPPD ini berupa nilai atau skor yang diberikan kepada masing-masing daerah di Indonesia dan dapat digunakan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang dinilai dengan EKPPD ini, antardaerah dapat berbeda dan dapat berubah setiap tahunnya. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat berupa dukungan dan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah daerah.

Berikut adalah daftar tiga pemerintah daerah provinsi dan 10 pemerintah daerah kabupaten dengan skor EKPPD tertinggi tahun 2016-2018

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120-10421 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100-53 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Tabel 1.1 Daftar Tiga Provinsi Dengan Skor EKPPD Tertinggi

Peringkat	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Nama Provinsi		
1	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur
2	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat
3	Kalimantan Timur	Jawa Tengah	Nusa Tenggara Barat

Tabel 1.2 Daftar 10 Kabupaten Dengan Skor EKPPD Tertinggi

Peringkat	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Nama Kabupaten		
1	Sidoarjo	Sidoarjo	Sidoarjo
2	Karanganyar	Tulungagung	Pasuruan
3	Kudus	Karanganyar	Karanganyar
4	Lamongan	Banyuwangi	Banyuwangi
5	Pinrang	Malang	Kuningan
6	Banyuwangi	Pasuruan	Bone
7	Bantul	Kuningan	Bintan

8	Probolinggo	Kudus	Bulukumba
9	Kuningan	Bulukumba	Gianyar
10	Pati	Bone	Pohuwato

Perbedaan kinerja setiap pemerintah daerah kabupaten di Indonesia ini dapat disebabkan karena karakteristik masing-masing pemerintahan daerah tersebut. Suryaningsih & Sisdyani (2016) menyatakan bahwa faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ialah karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing daerah sebagai pembeda antardaerah. Karakteristik pemerintah daerah ini dapat dilihat dari ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaannya, tingkat ketergantungannya dengan pemerintah pusat, belanja modal masing-masing pemerintah daerah, jumlah penduduknya, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (pegawai ASN) yang terdapat di setiap daerah, dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pemerintah pusat dalam melaksanakan EKPPD berdasar pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Oleh sebab itu, pemerintah pusat mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berdasarkan PP RI No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa,

“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.”

Selain melakukan EKPPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaksanakan pemeriksaan terkait dengan aspek keuangan setiap pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK ini, berupa opini, temuan, dan rekomendasi. Peneliti hanya mengambil salah satu hasil pemeriksaan BPK yaitu opini audit BPK.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012) yaitu pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Penelitian sebelumnya oleh Suryaningsih & Sisdyani (2016) meneliti karakteristik pemerintah daerah berupa kemakmuran, status daerah, tingkat ketergantungan, dan belanja modal, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Aziz (2016) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari tingkat efisiensi. Marfiana & Kurniasih (2013) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja daerah, dan ukuran legislatif, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari tingkat efisiensi, serta menambahkan variabel hasil pemeriksaan audit berupa temuan audit dan opini audit. T. R. Nugroho & Prasetyo (2018) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah, menggunakan indikator

pengukuran kinerja dari tingkat efisiensi. Keterbatasan dari penelitian tersebut ialah kesulitan dalam mengakses laporan keuangan daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur.

Penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh karakteristik pemerintahan daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Sudarsana & Rahardjo (2013) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan belanja modal pemerintah daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel temuan audit. Mustikarini & Fitriasari (2012) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, dan belanja daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel temuan audit. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel belanja daerah kurang tepat untuk menunjukkan tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Artha et al. (2015) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal pemerintah daerah, dan *leverage* pemerintah daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel temuan audit. Andani, Sarwani, & Respati (2019) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah, kemakmuran pemerintah daerah, dan belanja modal pemerintah

daerah, menggunakan indikator pengukuran kinerja pemerintahan daerah dari skor EKPPD, serta menambahkan variabel opini audit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2016-2018, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur mendapat skor EKPPD tertinggi sehingga memperoleh peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, terdapat banyak pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mendapat peringkat 10 teratas. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk menjadikan kabupaten di Provinsi Jawa Timur menjadi objek dalam penelitian ini. Variabel karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini, akan diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, jumlah penduduk, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan jumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Skor EKPPD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya dan latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015-2017 (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Jawa Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah tingkat kekayaan pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah belanja modal pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah jumlah penduduk pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
6. Apakah jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (pegawai ASN) pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
7. Apakah jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah kabupaten dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?
8. Apakah opini audit BPK dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
6. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (pegawai ASN) pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
7. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah kabupaten terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

8. Untuk mengetahui pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberi pandangan atau informasi tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional khususnya pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
2. Menjadi referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya dalam bidang kajian yang serupa.
3. Membantu dalam mengusulkan atau mempertimbangkan dalam memberikan kebijakan oleh pihak-pihak terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi arti penting penelitian, paparan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian awal, selain memaparkan arti penting penelitian, peneliti juga menonjolkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian orang lain. Dalam memaparkan hal ini, peneliti menuliskan kelemahan penelitian yang terdahulu. Kelemahan ini mungkin sebuah kelemahan penelitian yang sudah disadari dan ditulis peneliti di dalam kelemahan penelitiannya. Bab I terdiri dari beberapa subbab, yaitu

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Di bagian ini, peneliti memaparkan alasan teoretis atas penelitian yang dilakukan. Bagian ini juga sebagai dasar untuk membangun hipotesis. Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu landasan teori dan pengertian variabel, telaah penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat dua hal pokok, yaitu metode yang berhubungan dengan data dan metode yang berhubungan dengan analisis. Pada bagian yang berhubungan data, dipaparkan populasi penelitian. Bila populasinya besar dan penelitian hanya menggunakan sampel, maka peneliti mencantumkan metode pengambilan sampel serta cara menentukan jumlah sampelnya. Dalam paparan tentang alat analisis, peneliti menjelaskan alasan penggunaan alat tersebut.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini diawali dengan deskripsi objek penelitian serta analisis statistik deskriptif semua variabel. Pengujian validitas dan reliabilitas diperlukan untuk penelitian dengan data primer. Peneliti berusaha menjelaskan hasil pengujian hipotesis. Peneliti mendiskusikan hasil penelitian dan kaitannya dengan penelitian terdahulu.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Bagian ini adalah cuplikan ringkas dari bagian analisis data. Semua hal yang ditulis di sini sudah ada dan dibahas di bagian analisis data.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori penatalayanan (*stewardship theory*) dapat dikatakan “kebalikan” dari teori agensi (*agency theory*). Jika dalam teori agensi, manajer sebagai agen dan pemegang kepentingan sebagai prinsipal, maka dalam teori penatalayanan, manajer berperan sebagai *steward* dan pemegang kepentingan sebagai prinsipal. Teori penatalayanan (*stewardship theory*) ini kerap diimplementasikan di organisasi-organisasi publik, seperti instansi-instansi pemerintah. Donaldson & Davis (1991) berpendapat bahwa teori penatalayanan (*Stewardship Theory*) mempunyai model manusia yang berasal dari psikologi organisasi dan sosiologi organisasi. Motivasi manajer dalam teori penatalayanan bukan untuk mencapai kepuasan atau kepentingan individu, namun untuk kepuasan dan kepentingan prinsipal atau organisasi. McClelland & Herzberg et al. mengungkapkan bahwa,

“Pemegang peran organisasi termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan intrinsik melalui keberhasilan melakukan pekerjaan yang secara inheren menantang, untuk menjalankan tanggung jawab dan otoritas, dengan demikian akan mendapatkan pengakuan dari rekan kerja dan pimpinan.” (Donaldson & Davis, 1991)

Raharjo (2007) mendefinisikan teori penatalayanan (*stewardship theory*) sebagai situasi di mana manajer tidak mempunyai kepentingan

pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori penatalayanan (*stewardship theory*) mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Raharjo, 2007). Masalah mendasar dalam teori penatalayanan (*stewardship theory*) adalah bagaimana menciptakan struktur organisasi yang bisa membantu manajer untuk membuat keputusan dan pilihan-pilihan tindakan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi (Gudono, 2009). Teori penatalayanan (*stewardship theory*) menggambarkan situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Sjarif, Sofiati, & Sudaryo, 2017). Menurut Podrug, teori penatalayanan (*stewardship theory*) memandang bahwa pemerintah sebagai *stewards*/penatalayanan akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif, dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat (Sjarif et al., 2017).

Teori penatalayanan (*stewardship theory*) ini digunakan karena berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu total aset, total pendapatan asli daerah, total dana perimbangan, dan total belanja modal akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai *steward* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sebagai prinsipal atau pemegang kepentingan.

2.1.2 Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai suatu

hal yang menjadi ciri khas di setiap pemerintah daerah. Hal tersebut dapat berupa keunggulan ataupun kelemahan dari pemerintah daerah. Karakteristik ini yang akan membedakan satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Perbedaan karakteristik antardaerah diasumsikan dapat memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Harumiati & Payamta, 2014). Suryaningsih & Sisdyani (2016) juga mengemukakan bahwa karakteristik pemerintah daerah ialah identitas yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Sumarjo menyatakan perbedaan karakteristik antar daerah diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Dalam penelitian ini, variabel karakteristik pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat, belanja modal pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah pegawai aparatur sipil negara (pegawai ASN), dan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

2.1.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran (*size*) pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah karena pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur mempunyai ukuran yang beragam. Suhardjanto menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan tersebut (T. R. Nugroho & Prasetyo, 2018). Damanpour menyatakan bahwa ukuran (*size*) dapat diukur

dengan berbagai cara, antara lain jumlah aktiva, total pendapatan, tingkat produksi, dan jumlah karyawan (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Sedangkan Patrick (2007) mengungkapkan beberapa pengukuran ukuran, yaitu dengan jumlah staf, total pendapatan, dan total aset.

Ukuran (*size*) pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset atau aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena aset merupakan manfaat ekonomi masa datang yang dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat kejadian masa lalu. Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak selalu berupa aset keuangan. Suwanda (2015) menambahkan, aset termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik dan sumber daya yang dilestarikan karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah menunjukkan banyaknya sumber daya yang dimiliki daerah untuk kepentingan layanan masyarakat (Rustiyansih & Immanuela, 2014). Layanan pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ukuran (*size*) yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri, ukuran dalam hal ini adalah aset pemerintah daerah. Sudarsana & Rahardjo (2013) mengungkapkan, untuk memberi pelayanan yang baik, harus didukung dengan aset yang baik pula.

2.1.2.2 Tingkat Kekayaan

Seperti halnya ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur juga berbeda-beda, sehingga tingkat kekayaan ini dapat menjadi salah satu karakteristik

yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai aktivitasnya melalui penggalan potensi daerah atau dengan pendapatan daerahnya. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU RI No. 33 tahun 2004). Abdullah menyatakan, kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan menggunakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Harumiati & Payamta, 2014). Surepno (2013) menyatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun sumber daya atau kekayaan yang dimiliki daerah itu sendiri.

PAD adalah kekayaan asli dari pemerintah daerah (Masdiantini & Erawati, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan asli daerah atau hasil dari kekayaan lokal pemerintah daerah yang nantinya akan mampu menopang kebutuhan pemerintah daerah dan membiayai pembangunan pemerintah daerah. PAD mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan (R. A. Nugroho, 2014).

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah. Kemampuan suatu daerah untuk memperoleh PAD

akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah (Wahyuningsih, 2016). Kekayaan pemerintah daerah dalam penelitian ini diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan PAD karena PAD satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya pada masing-masing daerah (Artha et al., 2015).

2.1.2.3 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berbeda-beda, sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014, sumber pendapatan daerah tidak hanya pendapatan asli daerah (PAD) namun terdapat juga pendapatan transfer. Dana transfer merupakan jenis pendanaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi (Khasanah & Rahardjo, 2014). Pendapatan transfer ini sifatnya sebagai sumber penerimaan tambahan yang peranannya seharusnya tidak lebih dominan dari PAD. Salah satu pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah (UU RI No. 33 tahun 2004). Menurut Djaenuri,

“Dana perimbangan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan

pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.” (Alfarisi, 2015)

Selain itu, menurut Sari, Agusti, & Rofika (2016) dana perimbangan ditujukan untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Pengalokasian dana perimbangan ini merupakan kewajiban pemerintah pusat.

Dana perimbangan dikenal juga sebagai *intergovernmental revenue*. Nam mengemukakan bahwa *intergovernmental revenue* ialah penerimaan dana dari pusat yang ditujukan untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Aziz, 2016). Siregar juga mengemukakan, *intergovernmental revenue* adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Aziz, 2016).

Dengan demikian, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat diprosikan dengan dana perimbangan (*intergovernmental revenue*). Robbin & Austin menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* mempresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah (Puspita & Martani, 2012). Fakta bahwa pemerintah daerah masih mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat memperlihatkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (R. A. Nugroho, 2014).

Suhardjanto mengemukakan *intergovernmental revenue* adalah salah satu bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan

eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat sebesar 80% - 98% (T. R. Nugroho & Prasetyo, 2018). Kelly juga mengemukakan bahwa besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan (*intergovernmental revenue*) masih banyak ditemui di negara berkembang (Suryaningsih & Sisdyani, 2016).

2.1.2.4 Belanja Modal

Berdasarkan PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”

Belanja modal adalah salah belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Berdasar PP RI No. 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran dari anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; serta belanja aset lainnya.

Belanja modal memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mempunyai masa manfaat dalam jangka panjang dalam memberikan pelayanan publik. Belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (Ardhani, 2011). Pembangunan infrastruktur daerah,

seperti, jalan, jembatan, pabrik, gedung, dan aset tetap lainnya diharapkan akan membawa dampak positif secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Banyaknya infrastruktur serta sarana yang dibangun merupakan cerminan dari adanya belanja modal yang besar (Suryaningsih & Sisdyani, 2016). Pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal melalui proses tender atau lelang. Belanja modal menjadi salah satu karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena setiap pemerintah daerah mempunyai jumlah belanja modalnya masing-masing sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

2.1.2.5 Penduduk

Berdasar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penduduk Indonesia sangat heterogen, karena Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, yang di dalamnya mempunyai karakteristiknya masing-masing. Jumlah penduduk ini menjadi salah satu ukuran kompleksitas pemerintah daerah. Jumlah penduduk menjadi cerminan dalam mengukur kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Semakin banyak jumlah penduduk suatu

pemerintah daerah berarti semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi (Martani & Zaelani, 2011). Jumlah penduduk yang besar menuntut pelayanan publik yang lebih banyak dan merata. Dalam konteks pembangunan, ada dua jenis pandangan terhadap jumlah penduduk yaitu, menganggap jumlah penduduk sebagai penghambat pembangunan dan yang kedua menganggap jumlah penduduk sebagai pemicu pembangunan. Jumlah penduduk dapat menjadi salah satu karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena setiap pemerintah daerah di Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

2.1.2.6 Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN)

Berdasar UU RI No. 23 Tahun 2014, kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasar UU RI No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa (UU RI No. 05 Tahun 2014).

Tugas pegawai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Peran pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jumlah pegawai aparatur sipil negara ini menjadi salah satu karakteristik pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena jumlah pegawai merupakan salah satu kategori indikator dalam pengukuran kinerja berdasar *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* yaitu *measure of efforts* (non-keuangan).

2.1.2.7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasar PP RI No. 18 Tahun 2016, perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan OPD kabupaten/kota terdiri dari, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Besaran OPD di setiap daerah tidak sama, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah.

OPD merupakan salah satu struktur organisasi. Di Indonesia, OPD sama dengan diferensiasi fungsional. Jumlah OPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam membangun daerah. OPD dibagi berdasarkan fungsi-fungsinya.

2.1.3 Opini Audit

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan akan memperoleh hasil berupa temuan, opini, dan kesimpulan atau rekomendasi. Berdasarkan UU RI No. 15 Tahun 2004, opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini, yaitu, opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Pemberian opini tersebut didasarkan pada kriteria, kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan dianggap sangat baik, apabila mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dan cukup baik apabila mendapat opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Pemberian opini audit diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah atas informasi yang disajikan dalam

laporan tersebut.

2.1.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2009, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Berdasarkan PP RI No. 13 Tahun 2019, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Terciptanya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, dibutuhkan pengendalian dari pemerintah pusat, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Dalam penelitian ini, proksi dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor EKPPD.

Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2009, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD diterapkan berdasar asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber informasi utama pelaksanaan EKPPD menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD

ialah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah (Permendagri No. 73 Tahun 2009).

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terdiri dari EKPPD Tahunan dan EKPPD akhir masa jabatan kepala daerah. EKPPD Tahunan meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penentuan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota secara nasional. EKPPD yang dilakukan, menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan sistem pengukuran kinerja untuk membandingkan antarprovinsi dan kabupaten/kota secara nasional dan mengetahui tingkat perkembangan atau keberhasilan kinerja masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan tahun sebelumnya secara nasional. Sistem pengukuran kinerja mencakup penetapan IKK; teknik pengumpulan data kinerja; metodologi pengukuran kinerja; serta analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja. Metode EKPPD dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah hasil penjumlahan dari penilaian indeks capaian kinerja (dengan bobot 95%) dan indeks kesesuaian materi (dengan bobot 5%).

Hasil EKPPD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, terdiri dari laporan hasil evaluasi individu untuk masing-masing provinsi serta

laporan hasil pemeringkatan dan status provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, dapat diketahui hasil skor EKPPD. Skor tersebut menunjukkan seberapa baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Andani et al. (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, kemakmuran pemerintah daerah, belanja modal pemerintah daerah) dan opini audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia, sedangkan kemakmuran daerah dan belanja modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Artha et al. (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal pemerintah daerah, *leverage*) dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) tahun 2011-2013. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal pemerintah daerah, *leverage*, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Budianto (2012). Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh opini audit, temuan audit dan *gender* serta tingkat kemandirian pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, *gender*, tingkat kemandirian pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014). Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, status daerah) dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sementara itu belanja modal dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini & Fitriasari (2012). Penelitian ini mencoba untuk membuktikan pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah) dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah (skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/EKPPD). Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran, tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan temuan audit BPK dan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Qowi & Prabowo (2017). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tingkat kekayaan, ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal pemerintah daerah, dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tahun 2012. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat

kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, tingkat belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Rustiyaningsih & Immanuela (2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah di Indonesia (ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, *leverage*, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, jumlah penduduk) dan hasil audit BPK terhadap kinerja pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, *leverage*, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan hasil audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pernah dilakukan oleh Sudarsana & Rahardjo (2013). Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja modal pemerintah daerah) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat kekayaan berpengaruh

positif signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia, sementara itu temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan belanja modal pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
1.	2019	Mega Andani, Sarwani, dan Novita Weningtyas Respati	Ukuran pemerintah daerah, Kemakmuran daerah, Belanja modal, Opini audit	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Kemakmuran daerah dan belanja modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah provinsi di Indonesia.
2.	2015	Risma Diri Artha, Prayitno	Ukuran daerah, Tingkat kekayaan	Ukuran daerah berpengaruh signifikan

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
		Basuki, dan Alamsyah MT	daerah, Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, Belanja modal, <i>Leverage</i> , Temuan audit	terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif. Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.	2012	Wendy Budianto	Opini audit, Temuan audit, <i>Gender</i> , Tingkat Kemandirian pemerintah daerah, Ukuran pemerintah	Opini audit BPK, <i>gender</i> , tingkat kemandirian pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
			daerah	signifikan terhadap skor kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota. Temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota.
4.	2014	Yayuk Harumiati dan Payamta	Ukuran pemerintah daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, Belanja modal, Status daerah, Temuan audit	Ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan status daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
				<p>pemerintahan daerah. Belanja modal pemerintah daerah dan temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>
5.	2012	Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari	Ukuran pemerintah daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, Belanja daerah, Temuan audit	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Temuan audit dan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap skor

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
				kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota.
6.	2017	Rizal Qowi dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo	Tingkat kekayaan pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, Belanja modal, Temuan pemeriksaan BPK	Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
7.	2014	Sri Rustiyaningsih dan Intan Immanuela	Ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja daerah, <i>Leverage</i> , Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, Jumlah penduduk,	Ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, <i>leverage</i> , tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan hasil audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
			Hasil audit BPK	pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
8.	2013	Hafidh Susila, Sudarsana dan Shiddiq Nur Rahardjo	Ukuran daerah, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, Belanja modal, Temuan audit BPK	Ukuran daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota. Temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap skor

No.	Tahun	Peneliti	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
				kinerja pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Size yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai (Kusumawardani, 2012). Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar, akan dibutuhkan berbagai inovasi dan membuat pemerintah daerah semakin terpacu dalam berinovasi untuk daerahnya. Inovasi-inovasi tersebut nantinya akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian Patrick (2007) menemukan ukuran organisasi berhubungan positif dengan adopsi inovasi. Pemerintah daerah yang mempunyai ukuran yang besar akan dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang mempunyai ukuran kecil (Artha et al., 2015). Entitas yang memiliki ukuran besar memberikan harapan kepada publik untuk memberikan kontribusi dan pelayanan yang tinggi (Surepno, 2013). Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Dengan jumlah aset atau aktiva yang besar,

seharusnya membuat pemerintah daerah semakin bertanggung jawab untuk memberi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Artha et al. (2015); Budianto (2012); serta Mustikarini & Fitriasari (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dengan indikator total aset pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.2 Pengaruh Tingkat Kekayaan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Pemerintah daerah yang mempunyai tingkat kekayaan yang tinggi akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah daerah dengan PAD yang besar seharusnya lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerjanya karena mendapat tekanan lebih besar dari masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tinggi akan menunjukkan kepada *stakeholder*-nya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi (Puspita & Martani, 2012). Daerah yang memiliki kekayaan tinggi akan mampu meningkatkan sarana dan

prasarana layanan publik sehingga daerah tersebut akan mempunyai kinerja yang baik (Rustiyarningsih & Immanuela, 2014). Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*.

Florida menyatakan bahwa jumlah dan kenaikan PAD berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintahan daerah (F. Nugroho, 2012). Semakin besar angka PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada pada kewenangannya (Sari et al., 2016). Melalui PAD, pemerintah akan mampu secara mandiri menunjang kinerjanya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Wenny (2012) juga menyatakan, kenaikan PAD akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harumiati & Payamta (2014); Mustikarini & Fitriasari (2012); Qowi & Prabowo (2017); Rustiyarningsih & Immanuela (2014); serta Sudarsana & Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pengaruh tingkat kekayaan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H2: Tingkat kekayaan berpengaruh positif terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat semakin besar akan memperlihatkan semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya (Andirfa, Basri, & Majid, 2016). Apabila pemerintah daerah masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan mengharapkan pencairan anggaran dana perimbangan, maka hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (penduduk) tidak dapat berjalan dengan maksimal karena belanja aparaturnya belum dapat dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *stewardship theory*. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreativitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien (Oates dikutip dalam Adi, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Qowi & Prabowo (2017) serta Sudarsana & Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Artha et al. (2015) serta Rustiyaningsih & Immanuela (2014) juga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H3: Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Belanja modal memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mempunyai masa manfaat dalam jangka panjang untuk memberi pelayanan kepada publik. Belanja modal adalah salah satu langkah pagi pemerintah daerah untuk memberi pelayanan kepada publik (Ardhani, 2011). Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal pemerintah daerah) diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Aziz (2016) bahwa belanja daerah baik itu yang sifatnya rutin maupun belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Semakin banyak belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah (F. Nugroho, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa et al. (2016) serta Mulyani & Wibowo (2017) menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan

oleh Purba menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro (Artha et al., 2015). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H4: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.5 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Jumlah penduduk yang besar menuntut pelayanan publik yang lebih banyak dan merata. Semakin banyak jumlah penduduk maka partisipasi mereka juga akan tinggi, sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik (Rustiyaningsih & Immanuela, 2014). Semakin banyak penduduk semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus bekerja lebih keras dan meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Penelitian oleh Rustiyaningsih & Immanuela (2014) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian pengaruh jumlah penduduk terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini ialah,

H5: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.6 Pengaruh Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Tugas pegawai aparatur sipil negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi pelayanan kepada publik dengan profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) menyebabkan pekerjaan membutuhkan waktu yang lama karena ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan yang memberikan pelayanan (Kusuma, 2013). Semakin banyak pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan semakin cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah,

H6: Jumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.7 Pengaruh Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Besaran organisasi perangkat daerah (OPD) mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak urusan akan semakin kompleks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin kompleks penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibutuhkan semakin banyak organisasi perangkat daerah (OPD) supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin tertata, semakin terdiferensiasi, tidak ada pengelolaan yang tumpang tindih. Apabila tidak ada pengelolaan yang tumpang tindih, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian pengaruh jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah,

H7: Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

2.3.8 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Opini tersebut diberikan berdasarkan pada beberapa kriteria yaitu, kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Komitmen dan motivasi dari semua tingkatan pegawai dari tingkat bawah sampai atas sangat diperlukan, supaya tercipta LKPD dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan demikian, apabila semakin baik opini audit yang diberikan BPK, diharapkan akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya. Hal tersebut sehubungan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *stewardship theory*. Penelitian yang dilakukan oleh Andani et al. (2019) dan Budianto (2012) menunjukkan bahwa opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian pengaruh opini audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah,

H8: Opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian (Purwato & Sulistyastuti, 2007). Populasi penelitian ini ialah data keuangan dan non-keuangan seluruh pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 kabupaten tahun 2015-2017. Penulis memilih Provinsi Jawa Timur karena Provinsi Jawa Timur memperoleh skor EKPPD tertinggi serta mendapat peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut. Penulis memilih pemerintah daerah kabupaten karena menurut penulis kabupaten merupakan pemerintah daerah di tingkat bawah yang kinerjanya dapat mewakili pemerintah daerah di atas maupun bawahnya. Penulis juga memilih hanya pemerintah daerah kabupaten tidak dengan pemerintah daerah kota atas dasar kesetaraan karena menurut Marfiana & Kurniasih (2013) kabupaten dan kota mempunyai beberapa perbedaan karakteristik, di antaranya yaitu:

- a. Aspek luas wilayah : wilayah pemerintah daerah kabupaten terkadang lebih luas daripada wilayah pemerintah daerah kota, sehingga di wilayah pemerintah daerah kabupaten masih terdapat desa-desa yang tertinggal
- b. Aspek kependudukan : kepadatan penduduk di wilayah pemerintah daerah kabupaten lebih rendah daripada kepadatan penduduk di wilayah

pemerintah daerah kota, sehingga dapat menjadi permasalahan atau keterbatasan untuk pemerintah daerah kabupaten

- c. Aspek perekonomian : rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah daerah kabupaten lebih rendah daripada pemerintah daerah kota, akan berimplikasi pada proporsi sumber pendapatan asli daerah.

Purwato & Sulistyastuti (2007) menyatakan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Metode pengambilan sampel tersebut menggunakan metode sampling purposif (*purposive sampling*), yaitu teknik penarikan sampel yang didasarkan pada ciri atau karakteristik (tujuan) yang ditetapkan oleh peneliti sebelumnya (Dantes, 2012). Karakteristik-karakteristik yang akan digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah daerah (kabupaten) di Provinsi Jawa Timur yang mendapat skor EKPPD pada tahun 2016-2018
- b. Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan data total aset, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan total pendapatan tahun 2015-2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- c. Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memberikan informasi non keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara, dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2015-2017.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data total aset pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, total pendapatan pemerintah daerah, dan total belanja diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015-2017 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data tersebut diperoleh dari *website* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data opini audit BPK diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2016-2018. Data jumlah penduduk, jumlah pegawai aparatur sipil negara, dan jumlah organisasi perangkat daerah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten dan catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan data skor EKPPD diperoleh dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015-2017.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penelitian ini adalah

skor EKPPD tahun 2016-2018 yang terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan *range* 0-4 dengan definisi sebagai berikut:

Tabel 3.1 *Range* Kategori Prestasi

Skor	Status Kinerja
>3,00 – 4,00	Sangat Tinggi
>2,00 – 3,00	Tinggi
>1,00 – 2,00	Sedang
0,00 – 1,00	Rendah

Sumber : Permendagri No. 73 Tahun 2009

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK. Karakteristik pemerintah daerah diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal, jumlah penduduk, jumlah pegawai aparatur sipil negara, dan jumlah organisasi perangkat daerah. Adapun pengukuran masing-masing variabel independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset.

$$\ln(\text{Total aset})$$

2. Tingkat kekayaan pemerintah daerah

Tingkat kekayaan pemerintah daerah diukur dengan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan

$$Wealth = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan}$$

3. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah diukur dengan dana perimbangan dibandingkan dengan total pendapatan

$$Depend = \frac{Dana\ Perimbangan}{Total\ Pendapatan}$$

4. Belanja modal pemerintah daerah

Belanja modal diukur dengan total belanja modal

$$\ln(Total\ Belanja\ Modal)$$

5. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk diukur dengan

$$Population = \ln(Jumlah\ penduduk\ setiap\ kabupaten)$$

6. Jumlah pegawai aparatur sipil negara

Jumlah pegawai aparatur sipil negara diukur dengan

$$ASN = \ln(Jumlah\ pegawai\ ASN\ setiap\ kabupaten)$$

7. Jumlah organisasi perangkat daerah

Jumlah organisasi perangkat daerah diukur dengan

$$OPD = Sekretariat\ Daerah + Sekretariat\ DPRD + \\ Inspektorat + Dinas + Badan + Kecamatan$$

8. Opini audit

Opini audit diukur dengan

Tabel 3.2 Indikator Opini Audit

Opini Audit	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Opini (TMP)	1

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Ghozali mengemukakan bahwa statistik deskriptif terdiri dari penghitungan *mean*, *median*, standar deviasi, maksimum, dan *minimum* dari masing-masing data sampel. Maksud dari analisis ini untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel (Sumarjo, 2010).

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel (*panel pooled data*), yaitu gabungan dari *cross section* dan *time series*, sehingga penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dibantu dengan program *Eviews*. Iqbal (2015) menjelaskan tahapan untuk melakukan analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi Model Regresi Data Panel
 - a. *Common Effect Model*
 - b. *Fixed Effect Model*
 - c. *Random Effect Model*
- 2) Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel
 - a. *Chow Test*
 - b. *Hausman Test*
 - c. *Lagrange Multiplier*
- 3) Pengujian Asumsi Klasik
 - a. Normalitas
 - b. Multikolinearitas
 - c. Heteroskedastisitas
 - d. Autokorelasi
- 4) Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*) Model Regresi Data Panel
 - a. Uji Hipotesis
 - Uji F
 - Uji t
 - b. Koefisien Determinasi

3.4.2.1 Estimasi Model Regresi Data Panel

a. *Common Effect Model*

Common Effect Model merupakan teknik yang paling sederhana, yaitu dengan mengombinasikan data *cross section* dengan *time series*. Model ini tidak melihat adanya perbedaan waktu maupun entitas (individu)

atau dengan kata lain perilaku antarindividu sama dalam berbagai kurun waktu. *Common Effect Model* ini diasumsikan semua koefisien baik *intercept* maupun *slope* bersifat konstan. Pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaan *Common Effect Model*, ditulis sebagai berikut:

$$KP_{it} = \alpha + \beta_1 SZ_{it} + \beta_2 WH_{it} - \beta_3 DP_{it} + \beta_4 EX_{it} + \beta_5 POP_{it} + \beta_6 ASN_{it} + \beta_7 OPD_{it} + \beta_8 OA_{it} + e$$

b. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa konstanta (*intercept*) setiap individu berbeda namun *slope* antarindividu tetap sama. Model ini menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan konstanta (*intercept*) antarindividu. Model estimasi ini dapat disebut juga dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Persamaan *Fixed Effect Model*, ditulis sebagai berikut:

- 1) *Slope* tetap, tetapi konstanta (*intercept*) berbeda akibat perbedaan unit *cross section*

$$KP_{it} = \alpha_t + \beta_1 SZ_{it} + \beta_2 WH_{it} - \beta_3 DP_{it} + \beta_4 EX_{it} + \beta_5 POP_{it} + \beta_6 ASN_{it} + \beta_7 OPD_{it} + \beta_8 OA_{it} + e$$

- 2) *Slope* tetap, tetapi konstanta (*intercept*) berbeda akibat perbedaan unit *cross section* dan *time series*

$$KP_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 SZ_{it} + \beta_2 WH_{it} - \beta_3 DP_{it} + \beta_4 EX_{it} + \beta_5 POP_{it} + \beta_6 ASN_{it} + \beta_7 OPD_{it} + \beta_8 OA_{it} + e$$

c. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan konstanta (*intercept*). Model ini sangat berguna jika individu yang diambil sebagai sampel dipilih secara acak. Keuntungan menggunakan *Random Effect Model* adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)* (Hidayat, 2014). Persamaan *Random Effect Model*, ditulis sebagai berikut:

- 1) Konstanta (*intercept*) dan koefisien *slope* berbeda akibat perbedaan unit *cross section*

$$KP_{it} = \alpha_i + \beta_{1i}SZ_{it} + \beta_{2i}WH_{it} - \beta_{3i}DP_{it} + \beta_{4i}EX_{it} + \beta_{5i}POP_{it} + \beta_{6i}ASN_{it} + \beta_{7i}OPD_{it} + \beta_{8i}OA_{it} + e$$

- 2) Konstanta (*intercept*) dan koefisien *slope* berbeda akibat perbedaan unit *cross section* dan *time series*

$$KP_{it} = \alpha_{it} + \beta_{1it}SZ_{it} + \beta_{2it}WH_{it} - \beta_{3it}DP_{it} + \beta_{4it}EX_{it} + \beta_{5it}POP_{it} + \beta_{6it}ASN_{it} + \beta_{7it}OPD_{it} + \beta_{8it}OA_{it} + e$$

Keterangan:

KP_{it} : Kinerja Pemerintah Daerah pada waktu t

α : Konstanta (*intercept*)

$\beta_1 - \beta_8$: Koefisien regresi/koefisien *slope*

SZ_{it} : Ukuran pemerintah daerah pada waktu t

WH_{it} : Tingkat kekayaan pemerintah daerah pada waktu t

DP_{it} : Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada waktu t

EX_{it} : Belanja modal pemerintah daerah pada waktu t

POP_{it} : Jumlah penduduk pada waktu t

ASN_{it} : Jumlah Aparatur Sipil Negara pada waktu t

OPD_{it} : Jumlah Organisasi Pemerintah Daerah pada waktu t

OA_{it} : Opini audit pada waktu t

e : Koefisien *error*/standard *error*

3.4.2.2 Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel

a. Chow Test

Chow Test dilakukan untuk menentukan model manakah yang lebih baik atau paling tepat digunakan antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n - k$ untuk denominator (Iqbal, 2015).

Keterangan:

m : jumlah restriksi = jumlah individu dikurang 1

n : jumlah observasi = jumlah individu dikali dengan jumlah periode

k : jumlah parameter dalam FEM = jumlah variabel ditambah jumlah individu

H_0 : Model regresi data panel yang tepat adalah CEM

H_1 : Model regresi data panel yang tepat adalah FEM

Apabila nilai dari probabilitas $F < 0,05$, maka hipotesis nol ditolak (regresi data panel menggunakan FEM). Apabila nilai dari probabilitas $F > 0,05$, maka hipotesis nol diterima (regresi data panel menggunakan CEM).

b. Hausman Test

Hausman Test dilakukan untuk menentukan model manakah yang lebih baik atau paling tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

Statistik Hausman Test mengikuti distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen.

H_0 : Model regresi data panel yang tepat adalah REM

H_1 : Model regresi data panel yang tepat adalah FEM

Apabila nilai *P-value* $< 0,05$, maka hipotesis nol ditolak (regresi data panel menggunakan FEM). Apabila nilai *P-value* $> 0,05$, maka hipotesis nol diterima (regresi data panel menggunakan REM).

c. Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier test dilakukan untuk menentukan model manakah yang lebih baik atau paling tepat digunakan antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*.

Uji *Lagrange Multiplier* ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen (Iqbal, 2015).

H0 : Model regresi data panel yang tepat adalah CEM

H1 : Model regresi data panel yang tepat adalah REM

Apabila nilai LM hitung > nilai kritis *Chi-Squares*, maka hipotesis nol ditolak (regresi data panel menggunakan REM). Apabila nilai LM hitung < nilai kritis *Chi-Squares*, maka hipotesis nol diterima (regresi data panel menggunakan CEM).

3.4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang umum meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS), sedangkan *Random Effect Model* menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS).

Apabila model estimasi yang tepat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) yaitu *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*, maka pada penelitian ini hanya akan dilakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Penulis melakukan hal tersebut karena berdasar penjelasan Iqbal (2015), bahwa uji normalitas pada dasarnya bukan merupakan syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Model regresi yang baik ialah model yang menghasilkan estimasi linear tidak bias (*Blue Linear Unbiased Estimator*)

(Lestari & Setyawan, 2017). Penjelasan Iqbal (2015) lainnya bahwa autokorelasi hanya dapat terjadi pada data *time series*, uji autokorelasi pada data *cross section* atau data panel akan sia-sia atau tidak berarti.

Apabila model estimasi yang tepat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS) yaitu *Random Effect Model* (menggunakan pendekatan GLS), maka pada penelitian ini akan dilakukan uji normalitas dan uji multikolinearitas. Penulis melakukan hal tersebut karena berdasar penjelasan Lestari & Setyawan (2017), bahwa metode GLS menghasilkan estimator untuk memenuhi sifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) yang merupakan metode *treatment* untuk mengatasi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika data terdistribusi normal, maka dapat menggunakan metode statistik parametrik, namun jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan metode statistik non-parametrik. Santoso dikutip dalam Budianto (2012) menjelaskan bahwa uji normalitas dapat diukur menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Membuat grafik histogram dari residual. Apabila kurva pada grafik histogram berbentuk menyerupai lonceng (*bell-shaped*),

maka hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

- 2) Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dari residual. Apabila *normal probability plot* menunjukkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variabel bebas yang memiliki hubungan dengan variabel bebas lainnya (Purwato & Sulistyastuti, 2007). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas, dengan cara melihat pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai $VIF > 10$, menunjukkan bahwa model regresi terdapat multikolinearitas, begitu sebaliknya. Apabila nilai $VIF < 10$, maka model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Apabila terdapat masalah multikolinearitas, cara untuk mengatasinya menurut Purwato & Sulistyastuti (2007) adalah dengan:

- 1) Menghilangkan salah satu atau beberapa variabel yang mempunyai korelasi tinggi pada model regresi
- 2) Menambah data penelitian
- 3) Nilai variabel yang digunakan mundur satu tahun

c. Uji Heteroskedastisitas

Apabila varian variabel dalam model tersebut tidak konstan, maka model regresi tersebut mengandung masalah heteroskedastisitas (Purwato & Sulistyastuti, 2007). Model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka *variance* tidak sama atau *error* tidak konsisten. Heteroskedastisitas terjadi apabila nilai deviasi standar variabel dependen pada setiap variabel independen berbeda. Salah satu cara menghilangkan masalah heteroskedastisitas ialah mentransformasikan nilai variabel menjadi bentuk logaritma (Purwato & Sulistyastuti, 2007). Seperti dalam penelitian Budianto (2012), uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *White* (*White Heteroscedasticity Test*). Hasil yang dibutuhkan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs*R-squared*, dengan hipotesis sebagai berikut,

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma^2 \text{ (variance sama, tidak terjadi heteroskedastisitas)}$$

$$H_a : \sigma^2 \neq \sigma^2 \text{ (variance tidak sama, terjadi heteroskedastisitas)}$$

Menerima H_0 : apabila $P\text{-value} \geq \alpha$

Menolak H_0 : apabila $P\text{-value} < \alpha$

3.4.2.4 Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*) Model Regresi Data Panel

a. Uji Hipotesis

Nachrowi Iqbal (2015) menjelaskan bahwa uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat.

1) Uji Signifikansi Serentak (*F-test*)

Uji F-statistik diperuntukkan menguji koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan atau untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budianto (2012), hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan nilai *Prob (F-statistic)* dengan nilai α . Jika nilai *Prob (F-statistic)* $< \alpha$, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

2) Uji Signifikansi Parsial (*t-test*)

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Pengujian ini dilakukan untuk menguji koefisien (*slope*) regresi secara individu, dengan kata lain untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Budianto (2012) menjelaskan, jika nilai *prob t-sig* $< \alpha$, maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

b. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen (Purwato & Sulistyastuti, 2007). Nilai koefisien determinasi mencerminkan

seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independennya (Iqbal, 2015). Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase. Apabila nilai *adjusted* R^2 kecil (mendekati 0) berarti kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila *adjusted* R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya, nilai *adjusted* $R^2 = 0,85$, artinya variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi adalah 85% dan selebihnya (15%), variasi variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan dan non-keuangan seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 kabupaten tahun 2015-2017. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset, total Pendapatan Asli Daerah, total dana perimbangan, total belanja modal, dan total pendapatan. Data non-keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, jumlah Aparatur Sipil Negara, jumlah Organisasi Perangkat Daerah, opini audit, dan skor EKPPD. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling*, sehingga dihasilkan jumlah sampel seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.1. Pengumpulan data diperoleh melalui *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 4.1 Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah Pemerintah Daerah			Jumlah
	2015	2016	2017	
Jumlah populasi	29	29	29	87
Data tidak tersedia/tidak lengkap	(8)	(8)	(8)	24
Jumlah sampel akhir	21	21	21	63

Sumber : Olah data penulis

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan *mean*, *median*, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai *minimum* dari masing-masing data sampel. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel. Berikut hasil analisis statistik deskriptif sejumlah 63 sampel dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KP	SZ	WH	DP	EX	POP	ASN	OPD	OA
<i>Mean</i>	3.202 478	28.83 973	0.145 207	0.639 270	26.86 955	13.94 310	9.241 634	49.19 048	3.873 016
<i>Maximum</i>	3.592 200	29.49 947	0.328 337	0.745 015	27.59 841	14.76 198	9.745 195	69.00 000	4.000 000
<i>Minimum</i>	2.615 400	28.21 098	0.088 270	0.453 144	26.31 482	13.21 946	8.897 272	37.00 000	3.000 000
<i>Std. Dev.</i>	0.199 895	0.319 434	0.052 997	0.066 297	0.301 552	0.388 776	0.200 167	7.941 027	0.335 630
<i>Observations</i>	63	63	63	63	63	63	63	63	63

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintahan daerah (KP) yang diukur dengan skor EKPPD tahun 2016 – 2018, yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata skor EKPPD kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 sebesar 3,202478. Angka tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata kabupaten di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016-2018 mendapat status kinerja Sangat Tinggi (ST) sesuai dengan kategori yang diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2009. Nilai maksimum dari skor EKPPD sebesar 3,5922 yaitu Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017, sehingga kabupaten tersebut mendapat peringkat 2 se-Indonesia pada tahun 2017. Nilai minimum dari skor EKPPD sebesar 2,6154 yaitu Kabupaten

Pamekasan pada tahun 2018, sehingga kabupaten tersebut mendapat peringkat 321 se-Indonesia pada tahun 2018.

Ukuran pemerintah daerah (SZ) dalam penelitian ini diproksikan dengan total aset pemerintah daerah dan diukur dengan cara $\ln(\text{total aset})$. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata total aset kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 28,83973 yaitu sejumlah Rp3.349.157.708.992. Nilai maksimum dari total aset sebesar 29,49947 yaitu Kabupaten Tuban pada tahun 2017 sejumlah Rp6.478.269.434.516,72. Nilai minimum dari total aset sebesar 28,21098 yaitu Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 sejumlah Rp1.785.957.236.777,65.

Tingkat kekayaan pemerintah daerah (WH) dalam penelitian ini diproksikan dengan total Pendapatan Asli Daerah dan diukur dengan cara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan pemerintah daerah. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata tingkat kekayaan kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 0,145207 atau sebesar 14,52%. Nilai maksimum dari tingkat kekayaan sebesar 0,328337 atau sebesar 32,83% yaitu Kabupaten Gresik pada tahun 2015, dengan total Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp799.884.870.103,03 dan total pendapatan sejumlah Rp2.436.173.613.495. Nilai minimum dari tingkat kekayaan sebesar 0,088270 atau sebesar 8,83% yaitu Kabupaten Sumenep pada tahun 2017, dengan total Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp190.750.065.358,68 dan total pendapatan sejumlah Rp2.160.989.531.868,68.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah (DP) dalam penelitian ini diproksikan dengan total dana perimbangan dan diukur dengan cara total dana perimbangan dibagi dengan total pendapatan. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata tingkat ketergantungan kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 0,639270 atau sebesar 63,93%. Nilai maksimum dari tingkat ketergantungan sebesar 0,745015 atau sebesar 74,50% yaitu Kabupaten Madiun pada tahun 2016, dengan total dana perimbangan sejumlah Rp1.286.874.686.970 dan total pendapatan sejumlah Rp1.727.312.699.928,91. Nilai minimum dari tingkat ketergantungan sebesar 0,453144 atau sebesar 45,31% yaitu Kabupaten Gresik pada tahun 2015, dengan total dana perimbangan sejumlah Rp1.103.936.339.654 dan total pendapatan sejumlah Rp2.436.173.613.495.

Belanja modal pemerintah daerah (EX) dalam penelitian ini diproksikan dengan total belanja modal pemerintah daerah dan diukur dengan cara $\ln(\text{belanja modal})$. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata total belanja modal kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 26,86955 yaitu sejumlah Rp466.978.941.289. Nilai maksimum dari total belanja modal sebesar 27,59841 yaitu Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 sejumlah Rp967.917.005.411,98. Nilai minimum dari total belanja modal sebesar 26,31482 yaitu Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sejumlah Rp 268.151.647.436,91.

Jumlah penduduk pemerintah daerah (POP) dalam penelitian ini diukur dengan cara $\ln(\text{jumlah penduduk})$. Pada hasil analisis statistik

deskriptif tersebut, rata-rata jumlah penduduk kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 13,94310 yaitu sejumlah 1.136.086 orang. Nilai maksimum dari jumlah penduduk sebesar 14,76198 yaitu Kabupaten Malang pada tahun 2017 sejumlah 2.576.596 orang. Nilai minimum dari jumlah penduduk sebesar 13,21946 yaitu Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sejumlah 550.986 orang.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah (ASN) dalam penelitian ini diukur dengan cara ln (jumlah ASN). Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata jumlah Aparatur Sipil Negara kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 9,241634 yaitu sejumlah 10.318 orang. Nilai maksimum dari jumlah penduduk sebesar 9,745195 yaitu Kabupaten Jember pada tahun 2015 sejumlah 17.072 orang. Nilai minimum dari jumlah penduduk sebesar 8,897272 yaitu Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 sejumlah 7.312 orang.

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penelitian ini diukur dengan nilai asli jumlah OPD. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata jumlah Organisasi Perangkat Daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 49 OPD. Nilai maksimum dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah sebesar 69 OPD yaitu Kabupaten Malang pada tahun 2016 dan 2017. Nilai minimum dari jumlah Organisasi Perangkat Daerah sebesar 37 OPD yaitu Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dan 2016.

Opini audit (OA) dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy*. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bernilai 4, opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) bernilai 3, opini Tidak Wajar (TW) bernilai 2, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) bernilai 1. Pada hasil analisis statistik deskriptif tersebut, rata-rata opini audit pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selama tahun 2016-2018, tidak ada kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi sampel dalam penelitian ini mendapat opini audit Tidak Wajar (TW) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada tahun 2015, terdapat 16 kabupaten yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan lima kabupaten yang mendapat opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2016, terdapat 18 kabupaten yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tiga kabupaten yang mendapat opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2017, terdapat 21 kabupaten yang mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.3 Analisis Regresi Data Panel

4.3.1 Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel

a. Chow Test

Chow test digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang tepat di antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

H_0 : Model regresi data panel yang tepat adalah *Common Effect Model*

H1 : Model regresi data panel yang tepat adalah *Fixed Effect Model*

H0 ditolak jika nilai dari probabilitas $F < 0,05$, begitu sebaliknya, H0 diterima jika nilai dari probabilitas $F > 0,05$.

Tabel 4.3 Hasil Chow Test

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	4.506590	(20,34)	0.0001
<i>Cross-section Chi-square</i>	81.583951	20	0.0000

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Hasil Chow test menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0,0001. Nilai tersebut $< 0,05$, sehingga H0 ditolak atau menolak *Common Effect Model* dan H1 diterima atau menerima *Fixed Effect Model*. Sehingga, model regresi yang sesuai dari hasil Chow test ini adalah *Fixed Effect Model*.

b. Hausman Test

Hausman test digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang tepat di antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

H0 : Model regresi data panel yang tepat adalah *Random Effect Model*

H1 : Model regresi data panel yang tepat adalah *Fixed Effect Model*

H0 ditolak jika nilai dari *P-value* $< 0,05$, begitu sebaliknya, H0 diterima jika nilai dari *P-value* $> 0,05$.

Tabel 4.4 Hasil Hausman *Test*

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	27.749572	8	0.0005

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Hasil Hausman *test* menunjukkan bahwa nilai *P-value* sebesar 0,0005. Nilai tersebut $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak menolak *Random Effect Model* dan H_1 diterima atau menerima *Fixed Effect Model*. Sehingga, model regresi yang sesuai dari hasil Hausman *test* ini adalah *Fixed Effect Model*.

c. *Lagrange Multiplier Test*

Setelah melakukan *Chow test* dan Hausman *test*, mendapatkan hasil bahwa model regresi yang sesuai adalah *Fixed Effect Model*, maka tidak perlu dilakukan *Lagrange Multiplier Test*.

4.3.2 Model Regresi Data Panel

Berdasarkan dengan hasil *Chow test* dan Hausman *test* bahwa model regresi data panel yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Hasil perhitungan regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* disajikan dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-9.389842	8.229855	-1.140949	0.2619
SZ	0.227895	0.039552	5.761840	0.0000
WH	-2.564934	0.741977	-3.456892	0.0015
DP	0.521001	0.200395	2.599867	0.0137
EX	0.108786	0.022749	4.782057	0.0000
POP	-0.389246	0.473996	-0.821202	0.4173
ASN	0.823665	0.180504	4.563136	0.0001
OPD	0.023363	0.001484	15.74818	0.0000
OA	-0.051051	0.021012	-2.429557	0.0206
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.936227	<i>Mean dependent var</i>	6.900323	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.883708	<i>S.D. dependent var</i>	9.604723	
<i>S.E. of regression</i>	0.116099	<i>Sum squared resid</i>	0.458284	
<i>F-statistic</i>	17.82639	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.591084	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			
<i>Unweighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.735454	<i>Mean dependent var</i>	3.202478	
<i>Sum squared resid</i>	0.655382	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.725835	

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Nilai C di *coefficient* sebesar -9,389842, nilai ini disebut juga dengan konstanta atau intersep. Hasil ini dapat diartikan, jika besaran dari nilai SZ, WH, DP, EX, POP, ASN, OPD, dan OA yaitu sama, maka pengaruhnya terhadap KP, sebesar -9,389842.

Variabel SZ (ukuran pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar 0,227895. Hasilnya bernilai positif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan SZ (ukuran pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,227895.

Variabel WH (tingkat kekayaan pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar -2,564934. Hasilnya bernilai negatif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan WH (tingkat kekayaan pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 2,564934.

Variabel DP (tingkat ketergantungan pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar 0,521001. Hasilnya bernilai positif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan DP (tingkat ketergantungan pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,521001.

Variabel EX (belanja modal pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar 0,108786. Hasilnya bernilai positif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan EX (belanja modal pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,108786.

Variabel POP (jumlah penduduk pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar -0,389246. Hasilnya bernilai negatif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan POP (jumlah penduduk pemerintah

daerah) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,389246.

Variabel ASN (jumlah ASN pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar 0,823665. Hasilnya bernilai positif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan ASN (jumlah ASN pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,823665.

Variabel OPD (jumlah OPD pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar 0,023363. Hasilnya bernilai positif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan OPD (jumlah OPD pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,023363.

Variabel OA (opini audit pemerintah daerah), mempunyai nilai *coefficient* sebesar -0,051051. Hasilnya bernilai negatif, sehingga interpretasinya, jika terjadi kenaikan OA (opini audit pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,051051.

4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat dari hasil uji multikolinearitas pada *centered* VIF. Apabila nilai *centered* VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas, begitu sebaliknya,

apabila nilai *centered* VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
SZ	0.015381	19492.64	2.353153
WH	0.720615	26.18349	3.034595
DP	0.218430	137.4369	1.439467
EX	0.015432	16976.81	2.104050
POP	0.037592	11142.78	8.519081
ASN	0.054739	7126.045	3.288406
OPD	3.75E-05	141.8561	3.547255
OA	0.006955	160.1094	1.174606
C	14.27978	21755.64	NA

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Nilai *centered* VIF untuk variabel SZ (ukuran pemerintah daerah) sebesar 2,353153; variabel WH (tingkat kekayaan pemerintah daerah) sebesar 3,034595; variabel DP (tingkat ketergantungan pemerintah daerah) sebesar 1,439467; variabel EX (belanja modal pemerintah daerah) sebesar 2,104050; variabel POP (jumlah penduduk pemerintah daerah) sebesar 8,519081; variabel ASN (jumlah ASN pemerintah daerah) sebesar 3,288406; variabel OPD (jumlah OPD pemerintah daerah) sebesar 3,547255; dan variabel OA (opini audit pemerintah daerah) sebesar 1,174606. Berdasarkan nilai *centered* VIF dari semua variabel independen menunjukkan angka < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak mengandung multikolinearitas, dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen dalam penelitian ini.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi ini menggunakan uji *White*. Apabila nilai *P-value* $\geq \alpha$ (0,05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai *P-value* $< \alpha$ (0,05), maka terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroscedasticity Test: White

<i>F-statistic</i>	1.034638	<i>Prob. F(42,20)</i>	0.4832
<i>Obs*R-squared</i>	43.14334	<i>Prob. Chi-Square(42)</i>	0.4222
<i>Scaled explained SS</i>	37.57236	<i>Prob. Chi-Square(42)</i>	0.6656

Sumber : Olah data *Eviews 9*

Nilai *Obs*R-squared* pada penelitian ini sebesar 43,14334 dengan nilai *P-value* sebesar 0,4222. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada model regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas karena nilai *P-value* $\geq 0,05$. Berdasar hal tersebut, dapat diartikan bahwa varian variabel dalam model regresi ini bersifat konstan.

4.3.4 Uji Kelayakan (*Goodness of Fit*) Model Regresi Data Panel

a. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Serentak (*F-test*)

Uji signifikansi serentak (*F-test*) dilihat dari perbandingan nilai *Prob(F-statistic)* dengan nilai α (0,05). Apabila nilai *Prob(F-statistic)* $< \alpha$, maka variabel independen secara serentak

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai $Prob(F\text{-statistic}) > \alpha$, maka variabel independen secara serentak berpengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Pada tabel 4.5, menunjukkan hasil dari $Prob(F\text{-statistic})$ sebesar 0,000000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

2) Uji Signifikansi Sebagian (*t-test*)

Uji signifikansi sebagian (*t-test*) dilihat dari perbandingan nilai probabilitas (*P-value*) masing-masing variabel independen dengan nilai α (0,05). Apabila nilai *P-value* $< \alpha$, maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya, apabila nilai *P-value* $> \alpha$, maka variabel independen secara individual berpengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Pada tabel 4.5, menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a) Nilai *P-value* pada variabel ukuran pemerintah daerah (SZ) sebesar 0,0000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b) Nilai *P-value* pada variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah (WH) sebesar 0,0015. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c) Nilai *P-value* pada variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah (DP) sebesar 0,0137. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Nilai *P-value* pada variabel belanja modal pemerintah daerah (EX) sebesar 0,0000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e) Nilai *P-value* pada variabel jumlah penduduk pemerintah daerah (POP) sebesar 0,4173. Angka tersebut bernilai $> 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f) Nilai *P-value* pada variabel jumlah ASN pemerintah daerah (ASN) sebesar 0,0001. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa jumlah ASN pemerintah

daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

g) Nilai *P-value* pada variabel jumlah OPD pemerintah daerah (OPD) sebesar 0,0000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa jumlah OPD pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

h) Nilai *P-value* pada variabel opini audit pemerintah daerah (OA) sebesar 0,0206. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwa opini audit pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi (*adjusted R²*) pada tabel 4.5 menunjukkan hasil sebesar 0,883708 atau sebesar 88,37%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen (kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah) dapat dijelaskan sebesar 88,37% oleh variabel-variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ukuran pemerintah (SZ), tingkat kekayaan (WH), tingkat ketergantungan (DP), belanja modal (EX), jumlah penduduk (POP), jumlah ASN (ASN), jumlah OPD (OPD), dan opini audit (OA). Selebihnya sebesar

11,63%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel SZ (ukuran pemerintah daerah) sebesar 0,227895. Hasil tersebut bernilai positif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan SZ (ukuran pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,227895. Nilai *P-value* pada variabel SZ (ukuran pemerintah daerah) sebesar 0,0000. Angka tersebut bernilai < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Indikator ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah total aset yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah kabupaten. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian dan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andani et al. (2019), Artha et al. (2015), Mustikarini & Fitriasaki (2012), dan Budianto (2012) yang

menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya total aset yang besar, akan mempermudah pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, akan memacu pemerintah daerah untuk menciptakan inovasi-inovasi, yang nantinya inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya total aset juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi dan layanan yang memadai kepada masyarakat. Hal tersebut, sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

4.4.2 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel WH (tingkat kekayaan pemerintah daerah) sebesar -2,564934. Hasil tersebut bernilai negatif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan WH (tingkat kekayaan pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 2,564934. Nilai *P-value* pada variabel WH (tingkat kekayaan pemerintah daerah) sebesar 0,0015. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah yang diprosikan dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini terjadi karena total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki kabupaten di Provinsi Jawa Timur belum maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Khasanah & Rahardjo (2014), bahwa masih rendahnya tingkat kepedulian pajak dan retribusi yang dibayarkan. Di mana pajak dan retribusi tersebut sebagian komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sulitnya pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Hal tersebut, didukung dengan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini bahwa rata-rata total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,52%. Angka tersebut bernilai lebih kecil daripada nilai rata-rata dana perimbangan kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian lain oleh Noviyanti & Kiswanto (2016) dijelaskan bahwa tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pihak eksternal membuat kurang memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya karena tuntutan dari pihak eksternal juga rendah.

4.4.3 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel DP (tingkat ketergantungan pemerintah daerah) sebesar 0,521001. Hasil tersebut bernilai positif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan DP (tingkat

ketergantungan pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,521001. Nilai *P-value* pada variabel DP (tingkat ketergantungan pemerintah daerah) sebesar 0,0137. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang diprosikan dengan total dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata dana perimbangan kabupaten di Provinsi Jawa Timur sebesar 63,93%. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan terkait pengaruh tingkat kekayaan, dana perimbangan kabupaten di Provinsi Jawa Timur lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah termotivasi untuk memiliki kinerja penyelenggaraan yang lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat (Artha et al., 2015). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2016) bahwa besarnya dana perimbangan menunjukkan dana yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

4.4.4 Belanja Modal Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel EX (belanja modal pemerintah daerah) sebesar 0,108786. Hasil tersebut bernilai positif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan EX (belanja modal pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,108786. Nilai *P-value* pada variabel EX (belanja modal pemerintah daerah) sebesar 0,0000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pada penelitian ini, bahwa semakin besar jumlah belanja modal pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2016), Andirfa et al. (2016), dan Mulyani & Wibowo (2017). Belanja modal mempunyai masa manfaat dalam jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan dalam investasi modal (belanja modal) mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

4.4.5 Jumlah Penduduk Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel POP

(jumlah penduduk pemerintah daerah) sebesar $-0,389246$. Hasil tersebut bernilai negatif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan POP (jumlah penduduk pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar $0,389246$. Nilai *P-value* pada variabel POP (jumlah penduduk pemerintah daerah) sebesar $0,4173$. Angka tersebut bernilai $> 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiyaningsih & Immanuela (2014). Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naopal, Rahayu, & Yudowati (2017) bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan. Meskipun suatu kabupaten mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, tidak diikuti dengan skor kinerja penyelenggaraan yang tinggi pula. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten atau stabil, tidak terpengaruh dengan adanya jumlah penduduk yang tinggi ataupun rendah.

4.4.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel ASN (jumlah ASN pemerintah daerah) sebesar 0,823665. Hasil tersebut bernilai positif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan ASN (jumlah ASN pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,823665. Nilai *P-value* pada variabel ASN (jumlah ASN pemerintah daerah) sebesar 0,0001. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa semakin banyak jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah, maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah akan semakin cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut, sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

4.4.7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel OPD (jumlah OPD pemerintah daerah) sebesar 0,023363. Hasil tersebut bernilai positif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan OPD (jumlah OPD

pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,023363. Nilai *P-value* pada variabel OPD (jumlah OPD pemerintah daerah) sebesar 0,0000. Angka tersebut bernilai $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah OPD pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

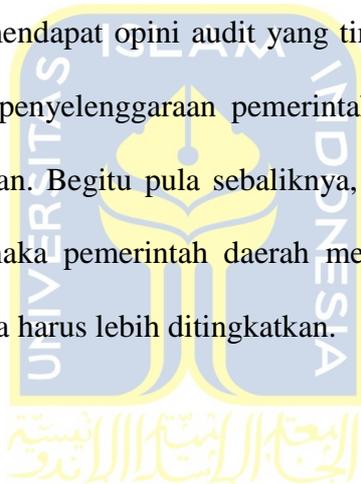
Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa semakin banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang mempunyai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jumlah banyak dan terdiferensiasi, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin tertata dan tidak ada pengelolaan yang tumpang tindih. Apabila pengelolaan tidak tumpang tindih, akan meningkatkan pelayanan kepada publik. Hal tersebut sesuai dengan teori penatalayanan atau *stewardship theory*.

4.4.8 Opini Audit Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi data panel (*fixed effect model*) pada tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *coefficient* variabel OA (opini audit pemerintah daerah) sebesar -0,051051. Hasil tersebut bernilai negatif, dapat diartikan, jika terjadi kenaikan OA (opini audit pemerintah daerah) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan KP (kinerja penyelenggaraan) sebesar 0,051051. Nilai *P-value* pada variabel OA (opini audit pemerintah daerah) sebesar 0,0206. Angka tersebut bernilai $< 0,05$.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini audit pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, apabila opini audit meningkat akan mengakibatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurun, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemerintah daerah apabila sudah mendapat opini audit yang tinggi, maka pemerintah daerah merasa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak perlu untuk lebih ditingkatkan. Begitu pula sebaliknya, apabila mendapat opini audit yang rendah, maka pemerintah daerah merasa kinerja penyelenggaraan pemerintahannya harus lebih ditingkatkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015 – 2017 (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Jawa Timur) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diproksikan dengan total aset berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan skor EKPPD.
2. Tingkat kekayaan pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diproksikan dengan total Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.
3. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diproksikan dengan total dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.
4. Belanja modal pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.

5. Jumlah penduduk pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.
6. Jumlah pegawai aparatur sipil negara (pegawai ASN) pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.
7. Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.
8. Opini audit pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan skor EKPPD.

5.2 Saran

Berdasar penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah provinsi pada umumnya dan pemerintah daerah

kabupaten khususnya dalam membuat kebijakan dan dalam menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah, agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih baik dan lebih merata.

2. Pemerintah daerah lebih meningkatkan dalam memberikan kualitas pelayanan publikasi terkait informasi-informasi yang dapat diakses secara umum baik dalam jaringan maupun luar jaringan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data pada tingkat provinsi atau pada setiap ibukota provinsi.
4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel independen lainnya, seperti *gender* pemimpin pemerintah daerah, jumlah DPRD, latar belakang pendidikan pemimpin pemerintah daerah, atau umur administratif pemerintah daerah.

5.3 Implikasi

1. Sebagai rujukan terkait permasalahan, pemodelan, dan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Pemerintah daerah kabupaten dapat memperbaiki aspek-aspek yang berpengaruh terhadap peningkatan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah kabupaten dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publikasi informasi yang dapat diakses secara umum baik dalam jaringan maupun luar jaringan.

5.4 Keterbatasan

1. Data penelitian tergantung terhadap data sekunder dari pemerintah, sehingga data yang digunakan bukan data terbaru.
2. Terdapat kesalahan dalam mengambil data opini audit, sehingga memengaruhi hasil dan analisa penelitian



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD." Paper dipresentasikan di *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, Indonesia. 23-26 Agustus*.
- Alfarisi, S. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- Andani, M., Sarwani, & Respati, N. W. 2019. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi di Indonesia." *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. S. A. 2016. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh." *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30–38.
- Ardhani, P. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal." Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Artha, R. D., Basuki, P., & MT, A. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal InFestasi*, 11(2), 214–229. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133>
- Aziz, A. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *EKSIS*, 11(1), 86–101. Retrieved from <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Budianto, W. 2012. "Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010." Skripsi, Universitas Indonesia.
- Dantes, N. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns." *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–66.
- Gudono. 2009. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Pensil Press.
- Harumiati, Y., & Payamta. 2014. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011." *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 75–87. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1244>
- Hidayat, A. 2014. "Penjelasan Metode Analisis Regresi Data Panel." Retrieved from Statistikian website: <https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data-panel.html>
- Iqbal, M. 2015. "Regresi Data Panel (2) Tahap Analisis".
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4fcf0d2fbfd0e/nprt/657/tap->

- mpr-no-iv_mpr_2000-tahun-2000-rekomendasi-kebijakan-dalam-penyelenggaraan-otonomi-daerah#dasarhukum
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. 2014. "Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–11.
- Kusuma, D. M. 2013. "Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur Dirik Malaga Kusuma." *EJournal Administrasi Negara*, 1(4), 1388–1400.
- Kusumawardani, M. 2012. "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia." *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.453>
- Lestari, A., & Setyawan, Y. 2017. "Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 2(1), 1–11.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Martani, D., & Zaelani, F. 2011. "Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah." Paper dipresentasikan di *Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh, Indonesia. 21-22 Juli*.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan." *KOMPARTEMEN*, 15(1), 57–66.
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007." Paper dipresentasikan di *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–22.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. 2017. "Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *ASSETS*, 7(1), 56–68.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 234–247.
- Nugroho, F. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, R. A. 2014. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. 2018. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah

- Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota di Jawa Timur.” *ASSETS: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Patrick, P. 2007. “The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government (The Pennsylvania State University).” Retrieved from https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4828
- Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Retrieved from https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/1854
- PP RI No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103890/pp-no-13-tahun-2019>
- PP RI No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016).
- PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Purwato, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Puspita, R., & Martani, D. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. <https://doi.org/10.7775/rac.v84.i1.7932>
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. 2017. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012.” *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13.
- Raharjo, E. 2007. “Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi.” *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. 2014. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah.” *Widya Warta*, (2).
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. 2016. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *JOM Fekon*, 3(1), 679–692.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. 2012. “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Sudaryo, Y. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).” *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i1.9759>
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. 2011. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1–94.
- Sumarjo, H. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja

- Keuangan Pemerintah Daerah.” Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Surepno. 2013. “Pengaruh Return on Equity (ROE), Ukuran (Size), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.” Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. 2016. “Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1453–1481.
- Suwanda, D. 2015. “Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK).” *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(4), 139–158.
- UU RI No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (2014). Indonesia.
- UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004). Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAAgQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2006). Indonesia.
- UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- UU RI No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). Indonesia.
- Wahyuningsih, Y. E. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” (Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Weber, M. 2009. “The Theory of Social and Economic Organization.” Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=G3TYBu6-4GOC&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Wenny, C. D. 2012. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan.” *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(1), 39–5.

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Gondong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 1145/DEK/10/Div.URT/VI/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Ivana Ardelia Rhomandhonna
No. Mahasiswa : 16312279
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman / 03 Januari 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Gedongan Lor, Rt 002/rw 002, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Indonesia Tahun 2016-2018"

Dosen Pembimbing : Arief Rahman, S.IP., S.E., M.Com., Ph.D.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2021
Dekan,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101

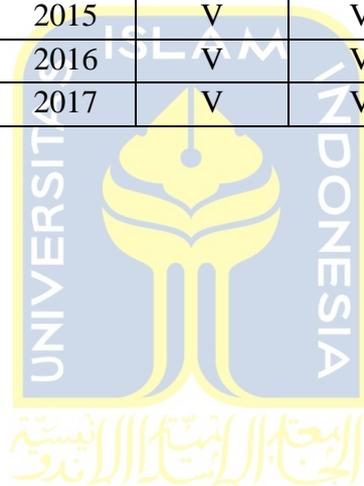
LAMPIRAN 2

Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten	Tahun	Skor EKPPD	Opini Audit	Data Non Keuangan	Data Keuangan
1.	Bangkalan	2015	V	V	X	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
2.	Banyuwangi	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
3.	Blitar	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
4.	Bojonegoro	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
5.	Bondowoso	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
6.	Gresik	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
7.	Jember	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
8.	Jombang	2015	V	V	X	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
9.	Kediri	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
10.	Lamongan	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
11.	Lumajang	2015	V	V	V	-
		2016	V	V	V	-

		2017	V	V	X	-
12.	Madiun	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
13.	Magetan	2015	V	V	V	-
		2016	V	V	X	-
		2017	V	V	-	-
14.	Malang	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
15.	Mojokerto	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
16.	Nganjuk	2015	X	-	-	-
		2016	-	-	-	-
		2017	-	-	-	-
17.	Ngawi	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
18.	Pacitan	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
19.	Pamekasan	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
20.	Pasuruan	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
21.	Ponorogo	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
22.	Probolinggo	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
23.	Sampang	2015	V	V	V	-
		2016	V	V	X	-
		2017	V	V	-	-
24.	Sidoarjo	2015	V	V	X	-
		2016	-	-	-	-

		2017	-	-	-	-
25.	Situbondo	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
26.	Sumenep	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
27.	Trenggalek	2015	V	V	V	-
		2016	V	V	V	-
		2017	V	V	X	-
28.	Tuban	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V
29.	Tulungagung	2015	V	V	V	V
		2016	V	V	V	V
		2017	V	V	V	V



LAMPIRAN 3

Data Ranking, Skor EKPPD, dan Opini Audit Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Tahun	Ranking	Skor EKPPD	Opini Audit
1.	Banyuwangi	2015	6	3,4551	WTP
		2016	4	3,5259	WTP
		2017	4	3,3873	WTP
2.	Blitar	2015	83	3,1472	WDP
		2016	92	3,2038	WTP
		2017	55	3,1238	WTP
3.	Bojonegoro	2015	45	3,2554	WTP
		2016	89	3,2100	WTP
		2017	54	3,1241	WTP
4.	Bondowoso	2015	57	3,2162	WTP
		2016	99	3,1746	WTP
		2017	81	3,0614	WTP
5.	Gresik	2015	17	3,3548	WTP
		2016	14	3,4728	WTP
		2017	12	3,3121	WTP
6.	Jember	2015	128	3,0457	WTP
		2016	143	3,0819	WDP
		2017	87	3,0491	WTP
7.	Kediri	2015	81	3,1531	WDP
		2016	126	3,1131	WTP
		2017	30	3,2027	WTP
8.	Lamongan	2015	4	3,4603	WDP
		2016	16	3,4686	WTP
		2017	19	3,2631	WTP
9.	Madiun	2015	65	3,2011	WTP
		2016	41	3,3267	WTP
		2017	24	3,2240	WTP
10.	Malang	2015	12	3,4197	WTP
		2016	5	3,5205	WTP
		2017	225	2,8128	WTP
11.	Mojokerto	2015	85	3,1451	WTP
		2016	47	3,3092	WTP

		2017	312	2,6448	WTP
12.	Ngawi	2015	124	3,0527	WTP
		2016	75	3,2400	WTP
		2017	64	3,1011	WTP
13.	Pacitan	2015	19	3,3435	WTP
		2016	33	3,3525	WTP
		2017	39	3,1840	WTP
14.	Pamekasan	2015	142	3,0057	WTP
		2016	221	2,9447	WTP
		2017	321	2,6154	WTP
15.	Pasuruan	2015	21	3,3366	WTP
		2016	6	3,5126	WTP
		2017	2	3,3978	WTP
16.	Ponorogo	2015	117	3,0695	WTP
		2016	177	3,0301	WTP
		2017	40	3,1672	WTP
17.	Probolinggo	2015	8	3,4397	WTP
		2016	54	3,2896	WTP
		2017	25	3,2230	WTP
18.	Situbondo	2015	96	3,1141	WDP
		2016	132	3,0995	WTP
		2017	118	2,9864	WTP
19.	Sumenep	2015	173	2,9340	WDP
		2016	49	3,2988	WDP
		2017	48	3,1416	WTP
20.	Tuban	2015	40	3,2596	WTP
		2016	65	3,2685	WTP
		2017	43	3,1559	WTP
21.	Tulungagung	2015	26	3,3229	WTP
		2016	2	3,5922	WDP
		2017	226	2,8109	WTP

LAMPIRAN 4

Data Non-Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah ASN	Jumlah OPD
1.	Banyuwangi	2015	1.594.083	13.166	52
		2016	1.599.811	11.421	52
		2017	1.599.811	11.032	53
2.	Blitar	2015	1.145.396	11.310	48
		2016	1.149.710	10.136	50
		2017	1.153.803	9.391	49
3.	Bojonegoro	2015	1.249.578	11.656	57
		2016	1.307.269	10.153	57
		2017	1.310.293	9.750	60
4.	Bondowoso	2015	761.205	10.350	46
		2016	765.094	10.045	46
		2017	768.912	8.912	49
5.	Gresik	2015	1.303.773	9.583	43
		2016	1.310.439	9.214	42
		2017	1.313.826	8.061	42
6.	Jember	2015	2.407.115	17.072	57
		2016	2.419.000	15.436	56
		2017	2.430.185	14.291	60
7.	Kediri	2015	1.544.639	12.572	55
		2016	1.554.385	11.259	54
		2017	1.561.392	10.761	57
8.	Lamongan	2015	1.342.266	11.853	55
		2016	1.354.119	10.246	62
		2017	1.360.987	9.831	62
9.	Madiun	2015	676.087	9.422	40
		2016	677.993	8.044	39
		2017	679.888	7.678	42
10.	Malang	2015	2.544.315	15.936	68
		2016	2.560.675	15.261	69
		2017	2.576.596	13.411	69
11.	Mojokerto	2015	1.104.522	10.523	46
		2016	1.117.405	9.099	46

		2017	1.138.262	8.625	43
12.	Ngawi	2015	828.783	12.391	43
		2016	829.480	11.057	43
		2017	829.899	10.420	44
13.	Pacitan	2015	550.986	8.644	37
		2016	552.307	7.510	37
		2017	553.388	7.312	41
14.	Pamekasan	2015	854.194	8.569	42
		2016	854.194	8.569	42
		2017	863.004	7.378	39
15.	Pasuruan	2015	1.581.787	12.476	52
		2016	1.593.683	12.065	52
		2017	1.605.307	10.490	54
16.	Ponorogo	2015	867.393	11.980	40
		2016	868.814	10.528	40
		2017	869.894	10.211	48
17.	Probolinggo	2015	1.140.480	9.404	53
		2016	1.151.613	8.436	52
		2017	1.158.653	8.338	52
18.	Situbondo	2015	669.713	8.198	41
		2016	673.282	7.901	41
		2017	676.703	7.423	47
19.	Sumenep	2015	1.072.113	10.846	55
		2016	1.123.310	10.453	55
		2017	1.128.596	9.655	55
20.	Tuban	2015	1.304.080	10.424	41
		2016	1.315.155	10.021	41
		2017	1.267.886	8.796	43
21.	Tulungagung	2015	1.021.190	13.585	48
		2016	1.026.101	13.239	48
		2017	1.043.182	11.462	47

LAMPIRAN 5
Data Total Aset dan Ukuran Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Total Aset			Ukuran Pemerintah Daerah		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Banyuwangi	Rp3.174.805.201.315	Rp3.952.525.019.219	Rp4.088.023.173.730	28,79	29,01	29,04
2.	Blitar	Rp2.933.836.151.657	Rp3.276.050.662.673	Rp3.792.057.642.163	28,71	28,82	28,96
3.	Bojonegoro	Rp3.647.323.570.257	Rp4.202.697.186.239	Rp5.262.459.942.890	28,93	29,07	29,29
4.	Bondowoso	Rp1.785.957.236.778	Rp2.447.998.796.537	Rp2.653.869.737.418	28,21	28,53	28,61
5.	Gresik	Rp4.744.141.046.272	Rp4.877.773.576.632	Rp4.984.572.804.347	29,19	29,22	29,24
6.	Jember	Rp2.699.317.484.453	Rp4.163.520.410.592	Rp4.260.819.436.048	28,62	29,06	29,08
7.	Kediri	Rp3.408.175.078.996	Rp3.644.896.096.678	Rp3.948.657.976.640	28,86	28,92	29,00
8.	Lamongan	Rp3.336.672.664.119	Rp3.936.924.453.223	Rp4.168.958.964.408	28,84	29,00	29,06
9.	Madiun	Rp3.659.535.328.307	Rp3.594.046.631.691	Rp3.896.172.139.681	28,93	28,91	28,99
10.	Malang	Rp5.167.826.670.137	Rp5.443.628.388.256	Rp6.448.952.128.223	29,27	29,33	29,49
11.	Mojokerto	Rp5.221.795.812.651	Rp5.531.822.453.439	Rp5.340.877.604.628	29,28	29,34	29,31
12.	Ngawi	Rp2.512.081.247.822	Rp2.677.125.202.104	Rp3.624.668.847.349	28,56	28,62	28,92
13.	Pacitan	Rp1.858.482.700.749	Rp1.928.491.626.214	Rp2.030.332.062.475	28,25	28,29	28,34
14.	Pamekasan	Rp2.512.081.247.822	Rp2.847.639.494.853	Rp3.202.523.870.568	28,55	28,68	28,79

15.	Pasuruan	Rp2.194.785.634.329	Rp3.239.481.822.492	Rp3.686.529.772.743	28,42	28,81	28,94
16.	Ponorogo	Rp2.097.142.822.965	Rp2.320.248.381.775	Rp2.689.745.987.623	28,37	28,47	28,62
17.	Probolinggo	Rp2.199.668.062.366	Rp2.234.234.936.253	Rp2.264.112.830.274	28,42	28,43	28,45
18.	Situbondo	Rp2.878.656.196.996	Rp3.308.702.401.716	Rp3.372.884.332.942	28,69	28,83	28,85
19.	Sumenep	Rp2.469.662.915.637	Rp2.628.908.392.589	Rp3.007.564.116.394	28,54	28,60	28,73
20.	Tuban	Rp4.465.044.292.476	Rp4.494.105.925.603	Rp6.478.269.434.517	29,13	29,13	29,50
21.	Tulungagung	Rp2.271.304.074.849	Rp3.223.112.024.221	Rp3.385.084.017.182	28,45	28,80	28,85



LAMPIRAN 6

Data Total Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Total Pendapatan Asli Daerah			Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Banyuwangi	Rp346.992.331.407	Rp367.872.665.894	Rp388.943.532.861	0,12	0,13	0,14
2.	Blitar	Rp216.648.256.570	Rp224.106.765.169	Rp322.878.943.149	0,10	0,10	0,14
3.	Bojonegoro	Rp337.695.825.017	Rp340.407.679.609	Rp448.188.138.725	0,12	0,11	0,15
4.	Bondowoso	Rp158.974.210.144	Rp177.025.949.242	Rp229.151.109.431	0,09	0,09	0,12
5.	Gresik	Rp799.884.870.103	Rp715.480.938.191	Rp871.564.498.248	0,33	0,28	0,32
6.	Jember	Rp461.882.363.147	Rp524.137.897.017	Rp719.213.581.071	0,15	0,16	0,21
7.	Kediri	Rp314.229.578.679	Rp339.113.897.822	Rp533.985.244.135	0,14	0,14	0,20
8.	Lamongan	Rp321.667.133.176	Rp403.474.462.147	Rp429.200.063.877	0,13	0,15	0,16
9.	Madiun	Rp149.628.355.468	Rp163.635.265.621	Rp241.944.162.780	0,09	0,09	0,14
10.	Malang	Rp461.887.704.825	Rp502.754.981.975	Rp743.313.499.675	0,13	0,15	0,20
11.	Mojokerto	Rp414.965.865.274	Rp447.620.851.329	Rp500.518.075.940	0,20	0,21	0,21
12.	Ngawi	Rp191.166.217.182	Rp195.606.461.847	Rp275.721.180.047	0,10	0,10	0,14
13.	Pacitan	Rp126.449.078.417	Rp150.466.067.821	Rp202.090.671.761	0,09	0,10	0,12
14.	Pamekasan	Rp170.258.936.684	Rp178.478.890.964	Rp243.311.843.020	0,10	0,10	0,13
15.	Pasuruan	Rp478.269.057.788	Rp480.758.720.671	Rp759.945.807.968	0,19	0,17	0,25
16.	Ponorogo	Rp210.695.348.135	Rp240.111.321.574	Rp308.232.104.639	0,11	0,12	0,14

17.	Probolinggo	Rp207.370.345.161	Rp221.719.364.518	Rp302.046.061.276	0,11	0,11	0,14
18.	Situbondo	Rp148.507.958.983	Rp173.836.184.925	Rp228.523.663.374	0,10	0,11	0,14
19.	Sumenep	Rp172.687.320.521	Rp208.982.186.961	Rp190.750.065.359	0,09	0,10	0,09
20.	Tuban	Rp345.965.620.446	Rp364.133.296.890	Rp497.223.807.932	0,17	0,17	0,21
21.	Tulungagung	Rp309.646.333.186	Rp342.570.756.799	Rp503.103.394.883	0,13	0,13	0,19



LAMPIRAN 7

Data Total Pendapatan Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Total Pendapatan		
		2015	2016	2017
1.	Banyuwangi	Rp2.779.148.430.147	Rp2.805.619.073.707	Rp2.732.022.666.956
2.	Blitar	Rp2.121.588.164.367	Rp2.240.251.740.265	Rp2.307.812.881.171
3.	Bojonegoro	Rp2.898.769.750.254	Rp3.004.084.557.599	Rp3.024.200.425.253
4.	Bondowoso	Rp1.800.277.754.980	Rp1.945.061.615.768	Rp1.924.903.618.064
5.	Gresik	Rp2.436.173.613.495	Rp2.522.076.193.169	Rp3.480.086.187.355
6.	Jember	Rp3.116.544.378.911	Rp3.192.000.871.973	Rp2.718.413.134.696
7.	Kediri	Rp2.317.562.354.065	Rp2.395.721.451.016	Rp2.716.042.671.045
8.	Lamongan	Rp2.436.090.963.267	Rp2.719.031.205.757	Rp1.758.060.590.949
9.	Madiun	Rp1.622.962.461.464	Rp1.727.312.699.929	Rp3.741.811.706.499
10.	Malang	Rp3.471.281.006.611	Rp3.439.632.063.349	Rp2.335.531.986.038
11.	Mojokerto	Rp2.118.171.111.163	Rp2.171.204.423.133	Rp1.996.633.707.315
12.	Ngawi	Rp1.912.183.743.923	Rp1.977.837.459.069	Rp1.655.537.179.548
13.	Pacitan	Rp1.426.596.968.333	Rp1.527.531.210.971	Rp1.906.203.284.544
14.	Pamekasan	Rp1.681.794.669.633	Rp1.827.846.755.475	Rp3.063.765.802.812
15.	Pasuruan	Rp2.518.560.295.177	Rp2.821.450.055.077	Rp2.215.197.920.702
16.	Ponorogo	Rp1.866.869.447.088	Rp2.026.630.853.799	Rp2.109.237.164.703
17.	Probolinggo	Rp1.842.200.787.638	Rp1.973.351.632.760	Rp1.620.456.354.002

18.	Situbondo	Rp1.520.359.975.571	Rp1.580.583.084.970	Rp2.160.989.531.869
19.	Sumenep	Rp1.952.700.349.515	Rp2.059.564.134.915	Rp2.376.526.696.431
20.	Tuban	Rp2.017.855.147.213	Rp2.183.545.377.124	Rp2.598.104.487.657
21.	Tulungagung	Rp2.369.737.223.682	Rp2.570.279.524.128	Rp2.598.104.487.657



LAMPIRAN 8

Data Dana Perimbangan dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Total Dana Perimbangan			Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Banyuwangi	Rp1.494.315.803.224	Rp1.847.137.392.967	Rp1.793.664.689.557	0,54	0,66	0,66
2.	Blitar	Rp1.242.813.217.360	Rp1.599.003.618.435	Rp1.543.625.115.315	0,59	0,71	0,67
3.	Bojonegoro	Rp1.958.214.470.034	Rp1.994.205.631.703	Rp1.840.662.906.127	0,68	0,66	0,61
4.	Bondowoso	Rp1.051.590.156.581	Rp1.297.761.524.802	Rp1.311.071.739.391	0,58	0,67	0,68
5.	Gresik	Rp1.103.936.339.654	Rp1.336.689.003.743	Rp1.324.731.018.270	0,45	0,53	0,48
6.	Jember	Rp1.917.759.331.546	Rp2.279.360.485.155	Rp2.309.229.753.650	0,62	0,71	0,66
7.	Kediri	Rp1.345.374.425.457	Rp1.647.816.793.647	Rp1.683.437.725.657	0,58	0,69	0,62
8.	Lamongan	Rp1.313.958.388.093	Rp1.708.680.363.941	Rp1.594.775.221.094	0,54	0,63	0,59
9.	Madiun	Rp1.017.860.927.782	Rp1.286.874.686.970	Rp1.180.876.436.337	0,63	0,75	0,67
10.	Malang	Rp1.893.231.262.923	Rp2.308.269.278.031	Rp2.299.979.677.583	0,55	0,67	0,61
11.	Mojokerto	Rp1.079.256.466.351	Rp1.315.350.439.444	Rp1.343.618.935.383	0,51	0,61	0,58
12.	Ngawi	Rp1.164.518.440.211	Rp1.468.168.730.397	Rp1.408.235.808.936	0,61	0,74	0,71
13.	Pacitan	Rp863.523.504.816	Rp1.087.172.953.668	Rp1.081.180.109.317	0,61	0,71	0,65
14.	Pamekasan	Rp1.053.832.740.582	Rp1.300.979.780.444	Rp1.337.421.843.722	0,63	0,71	0,70
15.	Pasuruan	Rp1.790.131.544.962	Rp2.087.984.077.197	Rp2.080.303.031.668	0,71	0,74	0,68
16.	Ponorogo	Rp1.144.291.367.053	Rp1.455.939.797.771	Rp1.433.075.787.760	0,61	0,72	0,65

17.	Probolinggo	Rp1.125.950.388.769	Rp1.320.791.144.299	Rp1.345.461.046.956	0,61	0,67	0,64
18.	Situbondo	Rp973.536.392.479	Rp1.171.851.135.392	Rp1.091.000.194.656	0,64	0,74	0,67
19.	Sumenep	Rp1.312.971.944.697	Rp1.519.918.959.175	Rp1.505.652.308.070	0,67	0,74	0,70
20.	Tuban	Rp1.141.173.339.001	Rp1.443.895.947.293	Rp1.418.244.471.704	0,57	0,66	0,60
21.	Tulungagung	Rp1.281.702.685.859	Rp1.726.713.610.875	Rp1.594.108.897.063	0,54	0,67	0,61

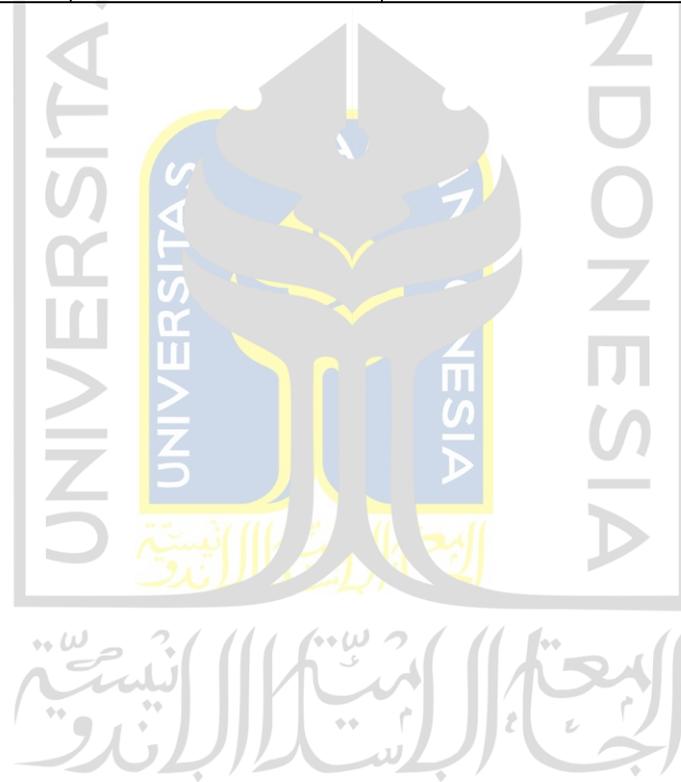


LAMPIRAN 9

Data Total Belanja Modal Pemerintah Daerah

No.	Nama Kabupaten	Total Belanja Modal			Belanja Daerah Pemerintah Daerah		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Banyuwangi	Rp699.415.745.319	Rp911.584.332.145	Rp657.077.214.260	27,27	27,54	27,21
2.	Blitar	Rp508.331.950.780	Rp692.718.770.257	Rp593.444.438.952	26,95	27,26	27,11
3.	Bojonegoro	Rp594.229.176.810	Rp967.917.005.412	Rp573.456.669.154	27,11	27,60	27,07
4.	Bondowoso	Rp404.576.533.409	Rp425.425.089.820	Rp383.574.373.763	26,73	26,78	26,67
5.	Gresik	Rp584.223.675.905	Rp413.339.658.373	Rp422.641.766.003	27,09	26,75	26,77
6.	Jember	Rp556.408.885.143	Rp460.451.300.847	Rp708.870.975.184	27,04	26,86	27,29
7.	Kediri	Rp457.787.623.448	Rp612.052.137.541	Rp675.279.276.055	26,85	27,14	27,23
8.	Lamongan	Rp459.305.792.650	Rp616.499.721.973	Rp505.221.589.585	26,85	27,15	26,95
9.	Madiun	Rp327.742.397.091	Rp443.808.272.890	Rp374.316.928.090	26,52	26,82	26,65
10.	Malang	Rp714.192.895.223	Rp683.932.346.302	Rp740.344.342.433	27,29	27,25	27,33
11.	Mojokerto	Rp491.829.693.652	Rp442.333.406.190	Rp576.646.344.208	26,92	26,82	27,08
12.	Ngawi	Rp313.226.242.409	Rp355.374.670.586	Rp379.215.035.738	26,47	26,60	26,66
13.	Pacitan	Rp268.151.647.437	Rp379.166.997.217	Rp346.602.302.143	26,31	26,66	26,57
14.	Pamekasan	Rp447.685.501.909	Rp544.165.819.579	Rp372.031.422.732	26,83	27,02	26,64
15.	Pasuruan	Rp464.634.017.141	Rp838.440.054.782	Rp492.094.079.745	26,86	27,45	26,92
16.	Ponorogo	Rp324.169.328.852	Rp376.402.638.867	Rp465.255.813.619	26,50	26,65	26,87

17.	Probolinggo	Rp343.189.339.904	Rp289.647.660.708	Rp326.769.685.304	26,56	26,39	26,51
18.	Situbondo	Rp340.683.173.357	Rp416.863.544.279	Rp345.382.416.018	26,55	26,76	26,57
19.	Sumenep	Rp370.141.331.155	Rp272.014.575.159	Rp291.884.664.571	26,64	26,33	26,40
20.	Tuban	Rp386.655.657.749	Rp464.180.160.121	Rp497.409.334.515	26,68	26,86	26,93
21.	Tulungagung	Rp444.587.079.517	Rp574.341.318.491	Rp395.842.837.980	26,82	27,08	26,70



LAMPIRAN 10

Hasil Uji dan Hasil Regresi

1. Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9.389842	8.229855	-1.140949	0.2619
SZ	0.227895	0.039552	5.761840	0.0000
WH	-2.564934	0.741977	-3.456892	0.0015
DP	0.521001	0.200395	2.599867	0.0137
EX	0.108786	0.022749	4.782057	0.0000
POP	-0.389246	0.473996	-0.821202	0.4173
ASN	0.823665	0.180504	4.563136	0.0001
OPD	0.023363	0.001484	15.74818	0.0000
OA	-0.051051	0.021012	-2.429557	0.0206

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.936227	Mean dependent var	6.900323
Adjusted R-squared	0.883708	S.D. dependent var	9.604723
S.E. of regression	0.116099	Sum squared resid	0.458284
F-statistic	17.82639	Durbin-Watson stat	2.591084
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.735454	Mean dependent var	3.202478
Sum squared resid	0.655382	Durbin-Watson stat	2.725835

2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.506590	(20,34)	0.0001
Cross-section Chi-square	81.583951	20	0.0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.655580	3.778860	0.967376	0.3377
SZ	-0.157386	0.124020	-1.269038	0.2099
WH	0.625357	0.848890	0.736676	0.4645

DP	-0.335536	0.467365	-0.717932	0.4759
EX	0.161344	0.124227	1.298786	0.1995
POP	-0.069006	0.193886	-0.355910	0.7233
ASN	0.080916	0.233965	0.345847	0.7308
OPD	0.004253	0.006125	0.694272	0.4905
OA	-0.031112	0.083394	-0.373074	0.7106
<hr/>				
R-squared	0.098657	Mean dependent var	3.202478	
Adjusted R-squared	-0.034875	S.D. dependent var	0.199895	
S.E. of regression	0.203350	Akaike info criterion	-0.216208	
Sum squared resid	2.232976	Schwarz criterion	0.089954	
Log likelihood	15.81056	Hannan-Quinn criter.	-0.095793	
F-statistic	0.738828	Durbin-Watson stat	1.606507	
Prob(F-statistic)	0.656940			

3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	27.749572	8	0.0005	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
SZ	0.171329	-0.040175	0.037035	0.2718
WH	-3.199323	-0.177422	2.123601	0.0381
DP	1.021249	0.127615	0.151636	0.0217
EX	0.034284	0.152483	0.005676	0.1167
POP	0.793976	-0.144526	4.980627	0.6741
ASN	0.985543	0.379265	0.236705	0.2127
OPD	0.037217	0.002797	0.000132	0.0027
OA	-0.058623	-0.048327	0.001250	0.7709
<hr/>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-24.63030	34.62341	-0.711377	0.4817
SZ	0.171329	0.235870	0.726371	0.4726
WH	-3.199323	1.712302	-1.868434	0.0703
DP	1.021249	0.561597	1.818471	0.0778
EX	0.034284	0.132637	0.258478	0.7976
POP	0.793976	2.241874	0.354157	0.7254
ASN	0.985543	0.555861	1.773002	0.0852
OPD	0.037217	0.013138	2.832777	0.0077
OA	-0.058623	0.073157	-0.801337	0.4285
<hr/>				
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.753120	Mean dependent var	3.202478
Adjusted R-squared	0.549807	S.D. dependent var	0.199895
S.E. of regression	0.134122	Akaike info criterion	-0.876271
Sum squared resid	0.611617	Schwarz criterion	0.110251
Log likelihood	56.60254	Hannan-Quinn criter.	-0.488267
F-statistic	3.704242	Durbin-Watson stat	2.505529
Prob(F-statistic)	0.000183		

4. Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
SIZE	0.015381	19492.64	2.353153
WEALTH	0.720615	26.18349	3.034595
DEPEND	0.218430	137.4369	1.439467
EXPENSE	0.015432	16976.81	2.104050
POPULATION	0.037592	11142.78	8.519081
ASN	0.054739	7126.045	3.288406
OPD	3.75E-05	141.8561	3.547255
OPINION	0.006955	160.1094	1.174606
C	14.27978	21755.64	NA

5. Uji Heteroskedastisitas (Uji White)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.034638	Prob. F(42,20)	0.4832
Obs*R-squared	43.14334	Prob. Chi-Square(42)	0.4222
Scaled explained SS	37.57236	Prob. Chi-Square(42)	0.6656

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-108.3276	285.5587	-0.379353	0.7084
SIZE^2	-0.291314	0.223631	-1.302653	0.2075
SIZE*WEALTH	4.401387	2.028436	2.169843	0.0422
SIZE*DEPEND	0.061571	0.941227	0.065416	0.9485
SIZE*EXPENSE	0.370641	0.334372	1.108470	0.2808
SIZE*POPULATION	-0.731945	0.586892	-1.247154	0.2267
SIZE*ASN	-0.006754	0.638813	-0.010572	0.9917
SIZE*OPD	0.022053	0.019162	1.150903	0.2633
SIZE*OPINION	1.029678	0.708089	1.454165	0.1614
SIZE	11.16235	12.70032	0.878903	0.3899
WEALTH^2	-7.806034	13.09784	-0.595979	0.5579
WEALTH*DEPEND	3.521084	8.779013	0.401080	0.6926
WEALTH*EXPENSE	-1.386949	1.633359	-0.849139	0.4059

WEALTH*POPULATION	-2.740588	5.373320	-0.510036	0.6156
WEALTH*ASN	5.241994	5.605743	0.935111	0.3609
WEALTH*OPD	0.078826	0.141627	0.556576	0.5840
WEALTH*OPINION	-8.932768	7.509784	-1.189484	0.2482
WEALTH	-66.88195	75.02315	-0.891484	0.3833
DEPEND^2	-0.979341	3.484628	-0.281046	0.7816
DEPEND*EXPENSE	-0.317288	0.950441	-0.333832	0.7420
DEPEND*POPULATION	-0.922835	1.813843	-0.508773	0.6165
DEPEND*ASN	0.916529	2.333348	0.392796	0.6986
DEPEND*OPD	0.031397	0.056254	0.558120	0.5830
DEPEND*OPINION	-2.650381	2.190885	-1.209730	0.2405
DEPEND	20.85126	34.00085	0.613257	0.5466
EXPENSE^2	0.209047	0.229366	0.911410	0.3729
EXPENSE*POPULATION	0.408009	0.566979	0.719619	0.4801
EXPENSE*ASN	-0.555960	0.716004	-0.776476	0.4466
EXPENSE*OPD	-0.028022	0.014214	-1.971449	0.0627
EXPENSE*OPINION	-1.744210	1.329695	-1.311736	0.2045
EXPENSE	-13.70291	10.86413	-1.261298	0.2217
POPULATION^2	0.816231	0.891349	0.915726	0.3707
POPULATION*ASN	-1.785449	1.420043	-1.257321	0.2231
POPULATION*OPD	-0.049747	0.035601	-1.397373	0.1776
POPULATION*OPINION	-0.644056	0.561383	-1.147266	0.2648
POPULATION	9.825832	13.52543	0.726471	0.4760
ASN^2	0.359561	0.918911	0.391291	0.6997
ASN*OPD	0.097648	0.041393	2.359074	0.0286
ASN*OPINION	3.225184	2.764215	1.166763	0.2570
ASN	14.36652	24.58807	0.584288	0.5656
OPD^2	0.000995	0.000555	1.793978	0.0880
OPD*OPINION	-0.025663	0.026793	-0.957812	0.3496
OPD	-0.118989	0.570439	-0.208592	0.8369
<hr/>				
R-squared	0.684815	Mean dependent var	0.035444	
Adjusted R-squared	0.022926	S.D. dependent var	0.055012	
S.E. of regression	0.054378	Akaike info criterion	-2.768049	
Sum squared resid	0.059139	Schwarz criterion	-1.305274	
Log likelihood	130.1935	Hannan-Quinn criter.	-2.192733	
F-statistic	1.034638	Durbin-Watson stat	2.197656	
Prob(F-statistic)	0.483242			

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الدكتور

